



**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANJA PEMBIAYAAN KOMISI X DPR RI DENGAN PENYELENGGARA
DIKDASMEN DAN DIKTI OLEH MASYARAKAT DENGAN PBNU, PP
MUHAMMADIYAH, PP PERSIS, DAN PB AL WASHILYAH**

- Tahun Sidang : 2023 - 2024
Masa Persidangan : V (lima)
Rapat Ke :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti oleh Masyarakat dengan PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB Al Washilyah
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 04 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB s.d 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara 1, lantai 1, Jln. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.
- Ketua Rapat : DR. Dede Yusuf ME., S.T.M.I.POL.
Sekretaris Rapat : Dadang Pratina, S.IP., M.H.
Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI
- Acara :
1. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan oleh Swasta (Sumber dan Komponen Kebutuhan).
2. Penyampaian Data dan Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan oleh Pemerintah kepada Swasta.
3. Usulan Regulasi Pembiayaan Pendidikan untuk Swasta.
- Hadir : **PIMPINAN :**
1. Dr. Dede Yusuf ME., S.T.M.I.Pol.
2. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
- ANGGOTA :**
F-PDI PERJUANGAN :
1. Dr. Andreas Hugo Pareira
2. Rano Karno, S.IP.
- F-P.GOLKAR :**
1. H. Muhammad Nur Purnamasidi
- F-P.GERINDRA:**
1. Ir. H. Nuroji
- F-P.NASDEM :**
1. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.MTr.

F-PKB :

1. Dr. H. Muhammad Kadafi., S.H., M.H.

F-P.DEMOKRAT :

1. -

F-PKS :

1. Hj. Ledia hanifa, A, S.Si, M.Psi., T.
2. Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., Med.

F-PAN :

1. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.

F-PPP :

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

UNDANGAN :

1. Ketua LPT NU PBNU (Aiunun Na'im)
2. Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.)
3. Wakil Ketua VI Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah (R. Alpha Amirracman, M.Phil., Ph.D.)
4. Bendahara Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D.)
5. Wakil Ketua Umum PP. Persis (Prof. Atip Latifulhayat, Ph.D.)
6. Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah (Prof. Dr. H. Deding Ishak, M.A.)

JALANNYA RAPAT:

Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./ WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI :

Dirjen Dikti, dan kemudian terakhir jadi Sekjen ya, Pak ya? Sekjen, dan akhirnya mengucapkan salam perpisahan kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya Pak ya? Dua tahun yang lalu ya kembali ke Perguruan Tinggi mewakili LPTNU.

**Yang kami hormati Bapak-Bapak dari Muhammadiyah,
Profesor Dr. Profesor Dr. Haji Irwan Aqib,
Pak Irwan Aqib, Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Yang kami hormati Bapak Andi Dwi Bayu Bawono, Bendahara Majelis
Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah,
Yang kami hormati Bapak Alfa Amirahman, betul?**

Betul iya Pak ya?

**Wakil Ketua 6 Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non
formal Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Yang kami hormati Bapak Muhammad Hairul Huda, Sekretaris Majelis
Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Pusat
Muhammadiyah,**

Lalu kemudian.

**Para tamu undangan yang kami hormati,
Dari Persis, Profesor Atif Latiful Hayat, Prof Atif, Wakil Ketua Umum PP
Persis,**

Lalu kemudian.

**Dr. A.I. M. Furkan, Ketua PP Persis,
Lalu, Prof. Dr. J. Jajang A. Rohmana, Rektor Universitas Persatuan Islam,**

Yang kebetulan adanya di dapil saya nih di Kabupaten Bandung. Saya lihat gedungnya besar sekali. Hebat ini, mudah-mudahan UKT-nya *nggak* mahal, Pak, ya.Lalu.

**Dr. Nur Mawan, MAG, Ketua Bidang Pendidikan Tinggi, dan Dr. Pepen
Irfan Fauzan, Sekretaris Bidang Pendidikan,**

Juga ini jauh ini dari Sumatera Utara.

**Kami hormati Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyyah, Bapak Dr. Haji
Amran Arifin, Sekjen PB Al-Wasliyyah,**

Pak Amran? Oh, berhalangan? Baik. Lalu.

Prof. Dr. H. Deding Ishak, Ketua PB AI-Wasliyyah,

Ini tokoh juga nih. Komisi X juga dulu Pak ya, 8 ya, Iya 8 dan 3.

**Lalu kemudian Bapak Haji Ridwan Tanjung, Ketua Majelis Pendidikan PB AI-Wasliyyah,
Lalu Bapak Dr. Bisbahul Fikri, Wakil Ketua Majelis Pendidikan PB AI-Wasliyyah,
Dan juga Bapak M. Razfi Louis M.Pd., Sekretaris Majelis Pendidikan PB AI-Wasliyyah,**

Mudah-mudahan sudah semuanya.

Yang kami hormati kawan-kawan Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan,

Saya mau langsung saja. Mungkin Bapak-Bapak sudah mengetahui dalam beberapa waktu belakangan ada sedikit rame-rame mengenai adanya UKT dan IPI yang dalam PTNBH-nya tiba-tiba meningkat begitu drastis.

Nah, kawan-kawan kebetulan di sini semua mengatakan kenapa tiba-tiba dinaikan. Apakah ada sesuatu yang dikejar misalnya? Apakah dalam rangka mengejar ketertinggalan atau apapun juga?

Tetapi ternyata sementara diduga itu karena adanya Permendikbud 02 2024 dan juga adanya PTNBH yang mungkin belum bisa diikuti dengan baik. Lalu kemudian kami diskusi bersama dengan kawan-kawan dan kami mengatakan kita mesti pahami terlebih dahulu bahwa pendidikan saat ini sudah memberikan porsi yang cukup besar yaitu 20% daripada APBN.

Namun pada realitasnya di Kemendikbud ternyata hanya mendapatkan porsi yang kecil, hanya sekitar 14 15% dari 20% tersebut. Jadi hanya seperdelapannya saja. Itu sebabnya anggaran pendidikan, fungsi pendidikan lainnya itu tidak terasakan oleh dunia pendidikan yang saat ini mungkin kita semua bersama-sama ada di sana. Karena ada yang turun transfer keuangan daerah ada yang turunnya berupa kementerian lembaga lain BABUN bahkan yang transfer keuangan daerah pun kita tidak tahu digunakan untuk apa.

Nah, kebetulan ada Prof. Ainun nanti itu cukup paham, nanti bisa menjelaskan. Namun, kami melihat kenapa perguruan-perguruan tinggi atau sekolah-sekolah ini kita bukan hanya bicara perguruan tinggi saja Pak, mulai dari SD, SMP, SMA. Ternyata mampu melaksanakan proses pendidikan yang mandiri tanpa terlalu membebankan kepada siswa baik itu orang tua maupun siswa.

Nah untuk itu kita pengen tahu sebetulnya, dasar *cost* pendidikan itu sebetulnya apa, berapa, dan mana yang prioritas sehingga disitu nanti akan

ketahuan mana yang peran negara dan mana yang peran masyarakat. Kami kebetulan baru saja nih, dua hari yang lalu pulang dari Finland, Pak Ainun. Kita mempelajari porsi-porsi pendidikan dan ternyata memang pendidikan menjadi salah satu yang dominan di Finland. Kita sudah rumuskan, pembiayaannya gratis, bahkan kuliah pun juga sebagian besar dibiayai oleh negara. Tentu pajaknya juga tidak berimbang, karena pajaknya di sana 40 %.

Tetapi kita ingin tahu sebetulnya apa yang membuat pendidikan di Indonesia ini cukup mahal. Karena ada cerita dari para orangtua-orangtua, terutama di perguruan tinggi, yang mengatakan bahwa ternyata biaya pendidikan di Indonesia, terutama di PTNBH, dibanding sama Australia, malah mahal di sini. Di Australia itu yang mahal biaya hidupnya, Pak. Biaya pendidikannya murah, jadi itu sebabnya kita ingin tahu dari Bapak-Bapak.

Bagaimana proses pelaksanaan menjalankan pendidikan selama ini dan kemudian kira-kira beban-beban apa saja atau pembiayaan dasar yang menjadi beban apakah yayasan, apakah ormas, dan beban orang tua.

Untuk itu, kami berikan kesempatan seluas-luasnya di sini sesuai undangan, mungkin dari NU terlebih dahulu. Pak Ainun sendiri Pak, ini sudah biasa berhadapan sama Komisi X, jadi cukup sendiri ini, luar biasa. *Monggo* silakan, Pak Ainun. Mohon maaf, untuk sementara kita sampai jam 4, gimana kawan-kawan? Jam 4 ya.

Oh maaf, jam 15 karena ada panja pariwisata berikutnya. Cukup ya? Baik.

Silakan, Pak Ainun.

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Alhamdulillah wa syukurillah,
Washolatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du,*

**Yang saya hormati Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Panja Komisi X,
Kemudian Bapak-Ibu dari Perwakilan Organisasi Masyarakat,
Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, dan sebagainya,
Dan hadirin semuanya,**

Ijinkan kami mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk hadir di sini menjelaskan tentang pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Sebelum kami lanjutkan, sedikit merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Sidang tadi. Kalau di perguruan tinggi swasta, khususnya di perguruan perguruan tinggi Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, persis, dan sebagainya. Kalau kita lihat, selama ini bisa berjalan bahkan berkembang dengan biaya berapa.

Sebetulnya kalau kita lihat, khususnya di perguruan tinggi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama memang berjalan, berkembang, tetapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa bisa berjalan? Ya karena banyak orang-orang yang *volunteers* di situ. Jadi berapapun kompensasi yang diberikan kepada para dosen, mereka tetap berdedikasi untuk mengabdikan di bidang pendidikan. Apalagi mereka berkembang dari pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang memang didirikan untuk mengabdikan kepada masyarakat mendidik masyarakatnya.

Sehingga berapapun dana yang dimiliki, ya tetap berjalan. Tetapi kalau kita lihat atau diukur dengan standar yang ada, ya banyak yang kurang. Memang ada satu dua yang bagus di perguruan tinggi negeri, di Perguruan Tinggi Nadatul Ulama, seperti misalnya Universitas Islam Malang, Universitas Nadatul Ulama Surabaya, Yogyakarta, itu relatif bagus karena memang *funding*-nya juga bagus.

Tapi yang lain-lain sangat cukup berat dalam menjalankan layanan tridharma pendidikan tingginya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kami akan memberikan paparan tidak panjang. Kami akan menjelaskan tentang profil Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama kemudian pola pengelolannya pendanaannya bagaimana dan sesuai dengan yang diminta dalam undangan juga usulan regulasi berkaitan dengan pembiayaan pendidikan tinggi khususnya untuk perguruan tinggi swasta.

Kemudian saya lanjutkan tentang nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama berdasar pada nilai-nilai *Islam Ahlusunnah Wal Jamaah an-Nahdiah* pengelolaan PTNU menggunakan prinsip-prinsip legalitas *governance* universitas yang baik, keadilan, inklusivitas dan profesionalitas, ini terceminkan dalam peraturan PBNU Nomor 1 Tahun 2023.

Selanjutnya dari segi statistik ada 282 perguruan tinggi dengan 12.202 dosen, 11.196 program studi dan 350.000 lebih mahasiswa. Tapi ini adalah data-data yang ada di PD Dikti, artinya yang ada di Kemendikbud belum termasuk yang ada di bawah Kementerian Agama. Karena di bawah Kementerian Agama itu juga sangat banyak, termasuk perguruan tinggi perguruan tinggi yang ada di pesantren-pesantren. Kalau itu dimasukkan, kami perkirakan populasinya dua kali lipat jadi mahasiswanya ada 700.000 lebih

Kemudian Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama itu sedang dalam proses penataan, jadi kalau kita lihat perguruan tinggi yang betul-betul di bawah organisasi PBNU yang secara legal di bawah PBNU itu hanya ada 30 Perguruan Tinggi Nadatul Ulama. Kemudian ada yang secara legalitas berbentuk yayasan tapi secara resmi berafiliasi, artinya ada dokumen legal yang menunjukkan afiliasinya dengan PBNU itu ada lima. Kemudian yang lebih banyak lagi adalah berbentuk yayasan yang dikelola oleh anggota jamaah ya anggota Nahdatul Ulama yang dalam banyak hal mereka juga berkoordinasi dengan PBNU.

Kemudian dari segi sebaran Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama ini ada mayoritas ada di Jawa ada juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian dari segi program studi dan juga populasi mahasiswanya mayoritas ada di program studi pendidikan, sosial, teknik, ekonomi, ada juga di kesehatan MIPA. Kemudian juga tentunya agama, ini yang sekali lagi ini yang ada di bawah Kemendikbud, kalau yang ada di bawah Kementerian Agama tentu yang paling besar atau mayoritas adalah bidang studi keagamaan yang kemudian dirinci dalam sub-sub bidang.

Kemudian dari aspek pendanaan selama ini dana yang diterima oleh Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama adalah dari wakaf dan juga bantuan atau pendanaan dari masyarakat lainnya, termasuk dari iuran atau SPP yang diberikan oleh mahasiswa. Namun perlu kita sampaikan di sini bahwa mayoritas mahasiswa kita itu adalah mereka yang dari golongan yang ekonominya menengah bawah ya bahkan termasuk yang tidak mampu.

Sehingga tidak sedikit kalau saya ke perguruan tinggi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, itu banyak mahasiswa yang tidak membayar ya, tapi mereka tetap dipersilakan untuk kuliah dan baru membayar apabila sudah mampu. Kemudian ada alokasi KIP kuliah yang tercatat di kami untuk tahun 2023 itu ada 2.300, memang ada juga yang diterima oleh mahasiswa PTNU yang kami tidak ketahui secara rinci ya, tapi ada saya lihat ada tapi yang tercatat di kami ada 2.300 mahasiswa, ini tahun ini tahun lalu juga sekitar 2000-an mahasiswa.

Kemudian untuk studi lanjut dosen, ada juga beberapa dosen yang menerima bantuan pemerintah dalam dari BPI, kemudian ada alokasi dari Baznas untuk mahasiswa maupun untuk dosen mayoritas untuk mahasiswa. Kemudian kami juga ada kerja sama dengan berbagai negara misalnya United Arab Emirat, Tiongkok, Rusia dan beberapa negara lainnya yang mengalokasikan beasiswa untuk warga negara Republik Indonesia.

Kemudian seperti tadi kami sampaikan bahwa mayoritas mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu sehingga PTNU ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam pendanaan operasional kemudian juga untuk pengembangan dosen dan staf serta fasilitas sarana dan prasarana.

Sehingga kalau ada kebijakan yang spesifik dari pemerintah untuk mengalokasikan dana yang lebih besar, itu akan sangat membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama. Secara spesifik kami menyampaikan usulan regulasi untuk memberikan afirmasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Ada skema-skema yang murni berdasarkan kinerja akademik padahal untuk masyarakat tidak mampu rata-rata ya tentu kinerja akademiknya, kemampuan akademiknya kurang walaupun ada satu dua yang melebihi oleh karena itu perlu afirmasi.

Demikian pula untuk alokasi KIP dan beasiswa studi lanjut dosen kemudian juga kami usulkan ada pembinaan yang diinisiasi atau dikelola oleh pemerintah pembinaan oleh PTN atau PTS yang telah maju ke PTS yang belum

maju ya. Ini penting untuk masyarakat secara keseluruhan karena bagaimanapun semakin banyak masyarakat yang bisa akses pendidikan tinggi, itu akan mempercepat perkembangan pembangunan bangsa ini

Saya kira demikian dari kami terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Ainun.

Walaupun kelihatannya Pak Ainun belum secara ini membuka mengenai pembiayaan ya misalnya. Sebenarnya kami ingin tahu kira-kira begini Pak *cost* terbesar itu di mana asetkah, gaji-gaji dosen, riset atau apapun juga sehingga nantinya *output* dari panja ini kita kurang lebih kita bisa tahu, sebenarnya standar biaya pendidikan ini sekian. Yang di atas itu bukanlah *basic* untuk pendidikan tapi misalnya tambahan gedung fasilitas dan lain-lain.

Nanti dari situ kita bisa tahu apakah KIP kita sudah cukup atau belum karena agak aneh ya Pak ya KIP kuliah kita dulu 2,4 juta, lalu kemudian naik jadi 4 ada yang 8.000.000. Banyak yang bisa melakukannya dengan baik tapi tiba-tiba di perguruan tinggi negeri bisa sampai 25 juta sampai 50.000.000 UKT.

Jadi kami pengen tahu sebetulnya standar biaya pendidikan itu berapa *sih* apakah di 2,4 juta di 4.000.000 di 8.000.000 itu cukup atau tidak supaya apa? Supaya harapannya tadi kan perlu ada tambahan beasiswa, perlu ada bantuan-bantuan lain ya. Apalagi mungkin nanti kawan-kawan yang lain juga bisa menjelaskan, kami perlu tahu beban terbesar di bidang pendidikan itu di sektor apa. Ini harapan kami begini Pak Ainun kita pengen BOS nih cukup apa *nggak* sih, karena kalau kita berbicara BOS tapi ternyata pungutan-pungutan pungutan-pungutan lain ini masih banyak sekali.

Nah apa yang hari kita lakukan karena anggaran *spare*-nya masih besar Pak tapi kan tidak turun ke Kemendikbud turunnya ke berbagai *stakeholder*. *Nah* itu yang kita pengen gali juga nanti bisa melalui diskusi, kita bisa lakukan tanya jawab. Berikutnya kami mohon dari pimpinan pusat Muhammadiyah mungkin bisa memberikan *insight* kepada kita silakan

Pak Ketua, Muhammadiyah iya.

MUHAMMADIYAH (Prof. Dr. H. IRWAN AKIB, M.Pd.):

Terima kasih.

*Bismillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Alhamdulillah wa syukurilah wala haula wala quwwata illa billah,
**Pimpinan beserta seluruh Anggota Panja yang saya hormati,
Bapak-Bapak dari PBNU, Persis dan AI-Wasliyyah yang saya hormati,**

Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan ini kami bisa *silaturahmi*.

Sekaligus, *sharing* terkait biaya pendidikan khususnya di kami sebelumnya karena di Muhammadiyah ada tiga lembaga yang mengurus pendidikan. Pendidikan tinggi oleh majelis pendidikan tinggi kemudian pendidikan dasar menengah oleh Dikdasmen kemudian lembaga pesantren yang. Yang hadir pada kesempatan ini dari majelis Dikti yang mengelola 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia, kemudian dari majelis Dikdasmen mengelola 5.000 lebih sekolah dasar, sekolah pendidikan dasar menengah kemudian madrasah diniyah dan seterusnya.

Oleh karena itu nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman yang lebih paham betul teknis dan komponen-komponen pembiayaan maupun apa yang diminta oleh panja tadi. Kira-kira di sisi mana yang paling besar pembiayaan itu, sebelumnya saya sampaikan bahwa dari 172 perguruan tinggi dan sekian ratus dari 5.000 sekolah itu semua dibawa persyarikatan Muhammadiyah.

Jadi kami satu satu apa namanya satu kepemilikan jadi tidak ada kepemilikan di daerah dan seterusnya, semuanya ada. Hanya memang untuk perguruan tinggi itu ya terus langsung dibawa koordinasi pimpinan pusat kalau sekolah menengah ke bawah itu dikoordinasinya di tingkat wilayah dan daerah tetapi tetap ada regulasi kita.

Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman dari Majelis Dikti Majelis Dikdasmen dulu Mas Alpha untuk menyampaikan secara detail apa yang menjadi pembicaraan kita pada kesempatan ini.

Silakan Pak Alpa.

MUHAMMADIYAH (R. ALPHA AMIRRACHMAN, M.Phil., Ph.D.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Alhamdulillah alhamdulillah wa syukurilah wala haula wala quwwata illa, Billah,
Amma ba'du,*

**Yang saya hormati pimpinan sidang Komisi X DPR RI,
Yang saya hormati organisasi organisasi penyelenggara pendidikan
berbasis masyarakat lainnya,**

Kami hadir di sini dipimpin oleh Prof Irwan Akib. Dan di samping saya adalah Pak Andi ya, Bendahara Majelis Pendidikan Dikti. Di samping saya

adalah Pak Khoirul Huda, Sekretaris Majelis Dikdasmen. Saya berusaha singkat aja, Bapak Ibu ya.

Bapak Ibu dewan yang kami hormati,

Tema daripada apa yang kami paparkan secara singkat ini adalah bagaimana kita memperkuat *public private partnership* ya. Bagaimana kita memperkuat *public private partnership* dalam sektor pembiayaan pendidikan nasional. Di Muhammadiyah sendiri kita punya amal-amal usaha pendidikan Muhammadiyah dan Aisyiyah ya. Aisyiyah adalah sayap perempuan dari Muhammadiyah.

Kita memiliki 172 perguruan tinggi kita memiliki 5437 pendidikan dasar dan menengah. Kita memiliki 324 Madrasah Diniyah Takmiliah. Kita memiliki 1031 Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kita memiliki 50 sekolah luar biasa, 110 pusat kegiatan belajar masyarakat, 440 pesantren dan 20.233 prasekolah.

Berikut adalah komponen pendidikan dari amal-amal usaha pendidikan kita. Kita coba dari penerimaan dana Pendidikan Tinggi Muhammadiyah ada sumber utama yaitu SPP DPP Dana Pengembangan Pendidikan.

Ada juga dana penunjang pendidikan, pendaftaran maba, heregistrasi, PKN, KKN, skripsi, wisuda, penerimaan kerja sama, dan hibah hibah penelitian dan PKM, beasiswa, kerjasama, unit usaha, dan sumber lainnya ya.

Berikutnya komponen pembiayaan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yang pertama dari biaya operasional akademik, biaya operasional non akademik, biaya SDM, pendidikan, dan tenaga kependidikan, biaya sarana dan prasarana, biaya pembinaan dan lain sebagainya.

Untuk pendidikan dasar dan menengah.

Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Kita mendapatkannya dari SPP dari DPP yang berasal dari siswa baru, dari iuran peserta didik setiap tahun, dari iuran peserta didik bagi sekolah yang tidak memungut SPP, uang registrasi kegiatan siswa, hasil unit usaha, uang bagi hasil bank pemerintah, dan bantuan masyarakat lainnya, termasuk juga dari pemerintah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah dan juga KIP yang besarnya.

Saya kira Bapak Ibu sudah sangat *mafhum*.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Kami melihat bahwa *public private partnership* kolaborasi ini merupakan sebuah keniscayaan. Mungkin *slide* bisa diteruskan, *next*, terus, terus, terus, ke ya, *oke* baik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, di situ disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dan penyelenggara pengendalian mutu layanan pendidikan. Undang-undang ini juga mengamanahkan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap guru guru di sekolah berbasis masyarakat, termasuk pasal 44 dan juga pasal 55 yang menekankan pentingnya bantuan terhadap pendidikan berbasis masyarakat.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Beberapa tahun yang lalu, tahun 2011, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari warga masyarakat untuk menghilangkan kata dapat pemerintah dapat membantu dapatnya dihilangkan menjadi pemerintah membantu dengan demikian dapat diinterpretasikan merupakan kewajiban dari pemerintah untuk membantu pendidikan berbasis masyarakat.

Public private partnership ini merupakan ikhtiar strategis yang seharusnya menjadi arus utama kita. Dengan *public private partnership*.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Pemerintah dapat menghemat investasi tanah dan gedung dan bisa berkonsentrasi pada penyediaan guru sementara masyarakat dapat memberikan kontribusi finansial kepada penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat. Dengan demikian beban pemerintah menjadi lebih ringan ya.

Untuk pendidikan berbasis masyarakat kita punya gedung untuk pendidikan tinggi kita juga punya gedung dengan masyarakat menyediakan lahan dalam bentuk wakaf dan mungkin pada saat yang sama pemerintah bisa berpartisipasi misalnya dalam penyediaan guru, gaji guru, mutu, dan lain sebagainya.

Jadi kami menganggap bahwa *public private partnership* ini merupakan keniscayaan dan juga untuk menghilangkan dikotomi antara negeri dan swasta. Jadi masyarakat bisa melakukan *fundraising* ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah kami diberikan *assistance* dari pemerintah, kami tidak hanya menggunakan *assistance* itu, *unseen* tapi kita juga dapat melipat gandakannya melalui *fundraising*. Jadi kurang lebih seperti itu skema-skema pembiayaannya dalam konsep *public private partnership*.

Baik saya coba singkat, Lalu kami juga.

KETUA RAPAT:

Maaf Pak, itu sudah berjalan, konsep ini sudah berjalan?

MUHAMMADIYAH (R. ALPHA AMIRRACHMAN, M.Phil., Ph.D.):

Selama ini kami kalau menerima bantuan dari pemerintah, kami melipat

gandakannya melalui *fundraising*. Jadi misalnya sekolah-sekolah kita mendapatkan ruang kelas baru, misalnya dapat satu, kita tambah *fundraising* dari anggota masyarakat kita, menjadi empat misalnya.

Jadi konsep seperti itu mungkin bisa dikembangkan. Bisa juga di di dibakukan ya dengan lebih dengan lebih *rigid*. Misalnya kita menyediakan bangunan, lalu misalnya pemerintah menyediakan guru.

Misalnya seperti P3K Pak Pimpinan Sidang. P3K itu kan guru-guru kita itu sebagian besar eksodus ke sekolahan negeri. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu dan itu sangat mungkin untuk mereka kembali mengajar di sekolah kami, di sekolah swasta dan itu menjadi bentuk *public private partnership* dari kita.

KETUA RAPAT :

Jadi artinya belum berjalan ya Pak? Ya belum berjalan sesuai ekspektasi.

MUHAMMADIYAH (R. ALPHA AMIRRACHMAN, M.Phil., Ph.D.):

Belum berjalan sesuai ekspektasi, masih berupa diberi bantuan. Dua kita lipat gandakan menjadi enam, misalnya seperti itu, melalui itu

Padahal kalau itu dibakukan secara lebih konkret mungkin akan lebih efektif dan efisien dan tidak ada redundansi. Artinya apa misalnya di sebuah tempat sudah ada perguruan tinggi Muhammadiyah, ya artinya tidak perlu lagi membuat Perguruan Tinggi Negeri di situ sudah ada SMP Muhammadiyah di *remote area*, tidak perlu lagi untuk membuat Sekolah Negeri baru. Tapi pemerintah bisa berpartisipasi melalui *public private partnership* menyediakan hal-hal yang belum, belum disediakan oleh kami. Misalnya seperti itu Bapak Pimpinan Sidang.

Selanjutnya yang P3K ini juga Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat ya bahwa beberapa waktu yang lalu, tahun 2022 kami sudah pernah RDPU juga dengan.

Yang saya hormati Pak Dede dan Bapak Ibu sekalian,

Terkait dengan P3K ini, kami sempat, kami juga dengan aliansi penyelenggara-penyelenggara pendidikan pada saat itu, kebetulan Dikdasmen kami dengan Ma'arif, NU, dengan PGRI, dengan Kristen Katolik dengan Taman Siswa juga menyampaikan guru-guru kami yang lolos P3K lalu pindah eksodus ke sekolah-sekolah negeri.

Pada saat itu kami minta untuk bisa dikembalikan ke sekolah asal dan di-esokannya, keesokannya itu, pada tanggal 19 Januari sudah ada RDP Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan itu sudah disampaikan dari Komisi X agar Kementerian mengambil terobosan hukum

agar guru-guru yang lolos P3K ini kembali ke sekolah asal. Ditandatangani oleh juga Pimpinan Sidang dan menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada saat itu.

Jadi kami di sini juga menuntut itu, bagaimana kelanjutannya dari RDPU kami dan RDP setelah rapat kerja setelahnya dengan Komisi X yang sudah ditandatangani oleh menteri terkait bahwa guru-guru yang lulus P3K akan dikembalikan ke sekolah swasta asalnya, makasih.

Dan lalu untuk berikutnya, saya sampaikan juga terkait dengan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekolah berbasis masyarakat, disebutkan bahwa tidak boleh lebih dari UMP upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota. Tidak boleh kurang dari itu, maksud saya. *Nah* itu kebanyakan dari sekolah-sekolah kami.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Sekolah-sekolah kami sebagian besar itu adalah sekolah air mata bukan sekolah mata air, sekolah perjuangan. Artinya apa sebagian besar hampir tidak mungkin untuk memenuhi di atas atau paling tidak selevel dengan UMP atau UMK terkait.

Nah mungkin pemerintah bisa mengambil peran dalam *public private partnership*. di situ kita sudah punya gedung, kita menyediakan guru, mungkin pemerintah bisa berpartisipasi dalam bentuk menyediakan kesejahteraan bagi mereka. Jadi pemerintah tidak perlu lagi membangun gedung-gedung perguruan tinggi maupun juga sekolah-sekolah. *Nah* ini rekomendasi terakhir.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Jadi Pak, *public private partnership* atau PPP ini, saya kira kami kira merupakan ikhtiar yang sangat strategis agar kita bisa menyelakan pendidikan secara efektif dan efisien dan mengambil peran yang tepat. Jadi sekolah-sekolah swasta juga kalau misalnya tidak pantas menerima bantuan akan diukur juga. Kita menduduk bersama untuk melihat mana yang diambil peran oleh pemerintah dan di mana peran yang diambil oleh pemerintah swasta.

Nah kita juga mohon sekiranya ada tindak lanjut dari tahun 2022 RDPU kami dan juga Rapat Kerja sehari setelahnya dengan kementerian terkait, agar guru-guru kami yang lolos P3K itu dikembalikan ke sekolah swasta asal.

Lalu juga kami mohon sekiranya Kartu Indonesia Pintar unit *cost*-nya ini bisa ditingkatkan untuk SD/MI menjadi 750.000 per tahun, SMP Tsanawiyah menjadi 1.000.000, SMA MA Aliyah menjadi 1.200.000 dan SMK menjadi 1.500.000. Karena terkait dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat dan kemahalan barang-barang yang ada juga.

Lalu terakhir Bapak Ibu, sistem pendidikan nasional ini berbasis masyarakat ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas, bahwa

pemerintah membina, membina sekolah-sekolah berbasis masyarakat, itu ada di pasal 44 dan juga ada di pasal 55.

Terakhir kebijakan yang serupa ini hendaknya diberlakukan secara menyeluruh pada amal-amal usaha pendidikan Muhammadiyah, Aisyiyah lainnya, bukan hanya pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah tapi juga para sekolah pesantrennya dan lain sebagainya.

Serta Bapak Ibu yang saya hormati,

Juga satuan-satuan pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya Muhammadiyah, PB mengharap ini bisa diterapkan secara menyeluruh untuk amal-amal usaha pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat saya kira itu saja, terima kasih. Mohon maaf jika ada khilaf.

*Nasrun minallah wa fathun qarib wabasyiril mukminin,
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih dari Muhammadiyah.

Memang kalau *nggak* salah RDP dan Raker terkait masalah guru P3K dikembalikan ke kepada swasta itu sudah kita simpulkan, tetapi kelihatannya jawaban dari Kementerian itu bertentangan dengan Undang-Undang ASN. *Nah* itu yang masih mungkin Mas. Masih mentok di sana Pak, karena Undang-Undang ASN itu mengatakan tidak bisa lagi seperti dulu. Itu apa namanya bantuan ya? Tugas pembantuan atau apa itu?

Nah ini kita masih masih berharap dari Komisi II untuk mengendorkan aturan main tersebut gitu.

Jadi kalau dari Kemendik saya rasa sih sebenarnya sudah setuju cuman karena sudah menjadi ASN dan di Undang-Undang ASN itu tidak boleh di perbantukan. Tapi kita akan upayakan lagi itu Pak, terima kasih banyak Pak.

Berikutnya dari Persis, silakan.

PERSIS (Prof. ATIP LATIFULHAYAT, Ph.D.):

*Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nasta'inu 'ala umuurind dunya wad diin
Asyhadu alla ilaaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa
rasuluhu amma ba'dah,*

**Pimpinan yang saya hormati dan para anggota Komisi X,
Rekan-rekan dari pimpinan pusat ormas Islam yang hadir pada, pada sore**

hari ini,

Pertama-tama, saya atas nama Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan apa namanya, mungkin pengalaman dan juga aspirasi dan analisis kami dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di lingkungan Persatuan Islam.

Sebelum lupa, kami ingin merespon terlebih dahulu yang tadi disampaikan oleh Pimpinan mengenai komponen terbesar apa dalam pendidikan di ormas-ormas dalam hal ini di Persatuan Islam namanya. Itu setelah kami cermati, komponen terbesar itu adalah untuk sarana. Itu hampir 100% lah dari mulai pengadaan tanah bangunan dan lain sebagainya. Sementara untuk pendidik itu kan kita sudah mendapat bantuan dalam ada dengan bentuk sertifikasi dari dosen begitu ya. Jadi dalam sarana yang komponen terbesar.

Nah untuk SDM-nya, dosennya, karena tadi juga disampaikan oleh dari apa, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah ya yang besar saja masih menyatakan ini, sebagai air mata belum menjadi mata air situ ya jadi persis itu. Contohnya untuk komponen biaya per mahasiswa gitu ya, per semester itu 2,5 juta. Sementara dari standar pemerintah, sekitar 8 berapa ya, 8.000.000 sampai 9.000.000 begitu. Jadi sisanya bagi tenaga pendidik lingkungan Persis ya nanti di akhirat gitu itunya itu diberikan jadi 2,5.

Nah maka kalau ditanya secara singkat jawabannya yang paling terbesar komponennya adalah pengadaan sarana untuk ke swasta itu karena pemerintah sudah merealisasikan tadi yang disebut dari PP Muhammadiyah sebagai apa namanya *public private partnership* itu. Untuk SDM itu sudah terlebih-lebih lagi sekarang itu boleh dikatakan hanya tinggal beberapa persen saja dulu yang di DPK gitu sudah dikembalikan, bahkan jadi sepenuhnya itu *kan* tenaga pendidik dari apa, swasta begitu.

Nah baik. Selanjutnya sesuai dengan yang dimintakan di dalam TOR, kami menyampaikan beberapa informasi, Persatuan Islam ini *alhamdulillah* tahun ini itu genap berusia 100 tahun ya. Hampir sama kita ormas-ormas yang berdiri sebelum Indonesia merdeka, satu abad, tapi kita belum memiliki apa namanya pimpinan wilayah sepenuhnya. Ada sekitar 25-an begitu provinsi yang ada di Indonesia. *Inshaallah on the way*, kita garap.

Dan untuk lembaga pendidikan yang kita miliki sampai saat ini berjumlah ya 2106. Ini agak terlewat untuk pendidikan tingkat usia dini gitu. Ini ya belum termasuk ya. Jadi di Persis itu ada pendidikan yang digarap usia dini itu secara khusus oleh otonom namanya Persistri. Kemudian ada bidang garapan pendidikan tinggi, pendidikan dasar menengah dan pendidikan khusus ya kayak *tahfiz* gitu untuk pesantren, dengan tenaga pendidik kurang lebih 216.340 pendidiknya ya, iya pendidiknya, peserta didik-nya belum masuk ya di sini.

Jadi merespon bagaimana tadi *public private partnership* itu, itu *alhamdulillah* Persis juga sudah menerima itu. Meskipun belum maksimal ini yang sudah maksimal itu adalah BOS ya. Sementara untuk KIP itu untuk tingkat SD itu baru 63% saja, SMP setingkat SMP 7,1%, SMA dan yang sederajat 5,3 dan Perguruan tinggi termasuk *ma'had ali* itu hanya 83 % di kita masih sedikit, jadi boleh dikatakan betul-betul kita itu mandiri ya untuk pendidikan.

Nah kemudian data untuk ke sertifikasi guru dan dosen juga sama ya. Dari 21.391 yang tersertifikasi itu, baru 5.350 orang. Jadi masih sangat sedikit sekali ya, sisanya 11.926 orang itu masih belum ya, maka memperhatikan data-data dan pengalaman. Kami ada analisis yang kami lakukan ya, pertama kami berpendapat dari postur anggaran yang dipaparkan pada RDP dengan Komisi X itu adanya ketidakadilan pendistribusian. Sehingga perlu dilakukan ya rekonstruksi dekonstruksi kebijakannya, regulasinya bagaimana?

Pertama, adanya anggaran Pendidikan Kedinasan di beberapa Kementerian ya, lembaga selain Kemendikbud dan Kemenag yang tetap masuk dalam alokasi anggaran 20%. *Nah* menurut kami ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan alokasi 20% sektor pendidikan di luar biaya pendidikan kedinasan.

Kedua, adanya transfer pendidikan melalui dana desa yang sangat tinggi lebih dari 50 %. Jadi *nah* kebetulan di samping di swasta, saya juga pendidik di PTNBH Pimpinan. Jadi saya memahami ya meskipun pendidikan tinggi kami tidak termasuk yang disorot, karena tidak ugul-ugulan gitu menaikannya. Ada alasan begitu ada alasan umpamanya di PTNBH itu untuk apa formasi pengangkatan ASN itu beberapa tahun moratorium sementara kebutuhan SDM mendesak, akhirnya membayai sendiri begitu dan ternyata ini tidak gampang perlu biaya dalam satu rapat ini umpamanya budget 1,5T. Ini kalau SDM sekian harus ditambah 500.000.000.000 dari mana?

Jadi PTNBH itu sebetulnya kan bukan otonomi menurut saya di bidang keuangan dan 20 tahun PTN kita itu tidak berpengalaman mencari uang sekarang dipaksa untuk mencari uang tidak bisa. Akhirnya yang paling gampang itu ke mahasiswa lagi dalam ini dan terjadi hal-hal yang lucu juga, semuanya diadakanlah *international program* hampir di situ. Dari awal saya mengkritik harus hati-hati apa tujuannya. Ternyata pengalaman lucu saya mengajar satu kelas 30 orang yang lancar berbahasa inggrisnya hanya lima. Iya, iya lima yang 25 tidak, pusing gitu mata kuliah ini disampaikan dalam bahasa Indonesia saja susah apalagi sampai dalam Bahasa Inggris.

Karena tujuannya hanya untuk mengumpulkan uang situ, jadi tidak bisa disalahkan sepenuhnya si perguruan tinggi itu kalau lihat salah satu itunya gitu ya karena tidak pengalaman mencari uang.

Nah kebijakan persentase yang sangat tinggi ini patut untuk dipertimbangkan kembali diantaranya dengan memperhatikan *stakeholder*

pendidikan swasta yang telah bekerja sama dengan Kemendikbud Kemenag khususnya ormas keagamaan.

Rekomendasi mempertimbangkan analisis alokasi anggaran 20% APBN sektor pendidikan dan menurut saya ini merupakan *core issue core problem* dari yang kemarin 20%. Kemendikbud kan menjadi terbebani seolah-olah 20% itu yang 660 sekian triliun itu Kemendikbud. Padahal tidak ternyata maka kami mengusulkan adanya rekonstruksi kebijakan atau regulasi anggaran pendidikan sebagai berikut.

Pertama terkait pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lembaga selain Kemedikbud diusulkan dua opsi perubahan. Satu pendidikan kedinasan tersebut dihapus di Kementerian/Lembaga untuk kemudian dilebur di bawah Kemendikbud. Contoh STAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara hampir semua Fakultas Ekonomi punya jurusan akuntansi dan ini ada ketidakadilan, yang sekolah di STAN Negeri gratis dia dikasih biaya hidup, iya langsung bekerja sementara yang di PTN tidak.

Padahal kenapa tidak begini, sudah saja diberikan mata kuliah akuntansi negara di situ. Kan nanti juga di situ ada pendidikan sebelum menjabat dan sebagainya dan di Kedinasan-kedinasan yang lainnya. Ini perlu dipertimbangkan kembali gitu umpamanya IPDN. Mohon maaf itu kan lulusannya hanya untuk jadi lurah dan belajarnya ilmu pemerintahan di semua fisp ada ilmu pemerintahan gitu.

Jika opsi pertama sulit dilakukan maka kami mengusulkan opsi kedua yaitu anggaran pendidikan kedinasan tersebut dikeluarkan dari porsi 20%. Jadi di anggaran masing-masing kementerian terkait tidak 20%. Kedua terkait anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah dalam Alokasi Dana Desa diusulkan supaya dikurangi menjadi maksimum 30% dari total anggaran pendidikan.

Hal itu untuk menambah prosentase dan pendidikan Kemendikbud Kemenag dalam konteks disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh ormas-ormas keagamaan. Kenapa diberi *stressing* karena kami itu jelas gitu. Kita ini kan bukan untuk kepentingan komersial meskipun sekarang kan punya lembaga pendidikan itu bisa cepat kaya juga.

Tapi ormas-ormas ini bukan untuk kepentingan apa para pengurusnya pemilikinya karena bukan individu pemilikinya. Usulan mitra pemerintah dalam hal ini organisasi keagamaan sebagai *partner* bagi pemerintah.

Satu distribusi anggaran 20% dari APBN yang transparan dan berkeadilan untuk semua jenjang pendidikan baik swasta maupun negeri BOP BOS tidak hanya berlaku untuk pendidikan tingkat dasar menengah tapi juga pendidikan tinggi swasta ya. Membuat peraturan yang sangat ketat terkait peralihan pengolahan PTN dari BLU menjadi PTN BH maka ini untuk di pertimbangan kembali menurut saya, menurut kami maaf.

Bantuan sarpras ditingkatkan tanpa membedakan lembaga pendidikan tinggi di bawah Kemenag dan Lembaga Perguruan Tinggi di bawah Kemendikud yang akan berakibat kesetaraan input siswa dan mahasiswa.

Mengkaji ulang menghapus jalur-jalur penerimaan mahasiswa yang melahirkan kompetisi bukan pada kapasitas intelektual tapi lebih karena kemampuan finansial. Kayak apa seleksi mandiri begitu, termasuk saya jadi contoh untuk untuk *international program* yang ada di kelas saya, 98% itu dari Jakarta orang Bandungnya cuma dua. Dan itu ternyata uangnya mahal berarti orang Bandung masih di bawah orang Jakartanya di situ. Jadi 98% orang Jakarta orang Bandung nya cuma dua orang.

Ya memberikan beasiswa untuk santri dan aktivis ormas karena di antara kadar bangsa ini banyak termasuk kategori generasi potensial kurang beruntung, menetapkan wajib belajar dari 12 tahun menjadi 16 tahun, memperjelas regulasi terkait dana pendidikan yang ditransfer ke daerah misalnya tentang isu pendidikan diniyah, memperjelas regulasi penyaluran bantuan KIP, *nah* itu harus jelas dulu.

Dan terakhir mohon adanya perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga pendidikan di bawah ormas sebagai *stakeholder* pendidikan yang telah berjuang sejak sebelum kemerdekaan, barangkali itu yang bisa kami sampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

AUDIENS:

Walaikumsalam.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak.

Ini rekomendasinya udah udah hasil Panja ini sudah selesai. Ini udah *nggak* perlu lagi kita bikin Panja nih, rekomendasinya sudah bagus.

Baik jadi tadi sudah mengatakan pendidikan ini berbasis air mata mulai dari yang terbesar NU, Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah.

Saya *nggak* tahu ini gimana ini Pak Deding ini, ahli ini tokoh pendidikan Bandung, *mangga* Pak Deding.

AL WASHLIYAH (Prof. Dr. H. DEDING ISHAK, MA):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,

f

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,

**Yang hormati Ketua beserta Anggota Panja Pembiayaan pendidikan
Komisi X DPR RI yang berbahagia,
Sahabat-sahabat rekan-rekan para senior,**

Kalau usianya di bawah saya rata-rata tapi pengalaman dan ini luar biasa Pak Dede.

Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari PB Al Washliyah mendapat perhatian yang istimewa dan *respect* dari DPR dalam Komisi X kepada ormas, ini luar biasa. Sepengetahuan saya RDP ini dimulai pada hari ini ya dengan ormas ini luar biasa dan diundang ini empat ormas yang *insyaallah* akan memberikan kontribusi bagi sinergitas dan penguatan Panja ke depan. Karena kami ini kebagian terakhir dan semua sudah disampaikan, ini para pakar para ahlinya dan para pengelola pengelola Panja Pendidikan yang luar biasa.

Jadi kami hanya memberikan semacam *underline* saja, yang pertama informasi terkait dengan pengeluaran pendidikan yang dilaksanakan oleh Al Washliyah. Itu hampir sama semangatnya dasarnya adalah keikhlasan kemandirian dan pengorbanan. Seperti halnya ketika ormas ini berjuang untuk memerdekakan bangsa ini mengisi kemerdekaan, mengawal pemerintahan hingga akhir zaman kira-kira begitu. Oleh karenanya seingat saya DPR ini telah membentuk undang-undang keormasan, kebetulan saya sebagai ketua panjanya ketika itu bersepakat menetapkan atau menggariskan bahwa ormas ini adalah aset bangsa begitu dan menjadi mitra strategis pemerintah.

Jadi bukan menjadi objek penderita begitu tapi *alhamdulillah* perkembangannya dengan kolaborasi pemerintah dan DPR Komisi X, berbagai capaian sudah kelihatan nampak. Hanya memang perlu akselerasi Pak Ketua oleh karenanya saya sampaikan juga informasi terkait dengan apa yang dikelola oleh Al Washliyah. Pertama sekaligus langsung usulan aja dana BOS sesuai dengan peruntukannya telah dapat membantu.

Jadi kami syukuri kami rasakan, itu ada manfaatnya sehingga perlu terus dialokasikan anggarannya. Namun demikian besaran dan BOS perlu mendapat peran pemerintah mengingat belum terpenuhi secara ideal komponen yang harus mendapat pembiayaan agar besaran dapat ditingkatkan mengingat kebutuhan pendidik siswa peserta didik yang semakin meningkat.

Yang kedua dana PIP KIP sesuai dengan peruntukannya membantu biaya pendidikan sehingga perlu terus dialokasikan ditingkatkan anggarannya agar jangkauan semakin luas. Tiga pembiayaan untuk perbaikan sarana prasarana perlu lebih merata, agar kondisi sekolah dan madrasah tampak lebih baik, empat peningkatan alokasi anggaran untuk program pendidik guru dan tenaga kependidikan perlu terus ditingkatkan, perlu dialokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola, mengingat lembaga pendidikan lingkungan Al Washliyah dan umumnya ormas.

Mudah-mudahan untuk Muhammadiyah dan NU serta Persis sudah tidak masalah tapi kami juga perlu pendampingan dalam aspek peningkatan kapasitas, baik pengelolaan pendidikan sekolah maupun tenaga kependidikan.

Nah kami memiliki jumlah sekolah dan madrasah Al Washliyah seluruh Indonesia selain Sumatra Utara menjadi sumber begitu kira-kira, basis begitu tetapi kami sudah menyebar seluruh Indonesia. Termasuk *insyaallah* ke Jawa Barat dan Banten Pak Rano Karno jadi kami akan dirikan universitas di Banten sedang dibangun sekarang.

Kemudian di Jawa Barat kami lakukan kerja sama dengan perguruan tinggi termasuk dengan sekolah kami Al Jawami begitu Pak Dede di Kabupaten Bandung juga Dapil Bapak, di Al Jawami nanti. Al Washliyah akan kerja sama dengan Al Jawami, jadi sebetulnya kita bisa membangun sendiri tapi juga kita bisa kerja sama sekarang ini untuk mengatasi *problem problem* pendanaan pembiayaan yang demikian besar yang harus ditanggung oleh pendidikan tinggi swasta sebetulnya itu.

Oleh karenanya berbagai cara kita tempuh, salah satunya adalah kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada begitu kalau Persis sudah mendirikan universitas ya *alhamdulillah* kita berguru kepada Persis.

KETUA RAPAT :

Merge ya Pak, Bukan merger.

AL WASHLIYAH (Prof. Dr. H. DEDING ISHAK, MA):

Bukan *merger* bukan.

Ya kemudian ini sudah ada 241, TK 81 semuanya pendidikan dasar menengah. Ini 709 kemudian untuk perguruan tinggi ini ada 11 perguruan tinggi, baik ini yang ke ini, ya 9 sekarang nanti 11 ya. Baik yang di lingkungan Kemendikbudristek dan Kemenag begitu, seperti Sekolah Tinggi Agama Islam kemudian Institut Agama Islam Islam gitu.

Nah terkait dengan ini berbagai usulan tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari NU Muhammadiyah, Persis jadi kami sendiri sepakat.

Jadi yang pertama selain *political will* komitmen begitu layanan prima dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan, utama *stakeholder* utama di bidang pendidikan, itu memang perlu ada keberanian juga Pak dari pemerintah itu untuk menetapkan pendidikan ini sebagai panglima utama gitu. Orang sering mengatakan hukum sebagai panglima betul.

Nah tapi telah melanjut evaluasi ke belakang ini berbagi negara ini kemajuan ini karena pendidikan ini, *nah* jadi sumber daya manusia oleh karenanya kalau pendidikan ini menurut saya ini adalah panglima utamanya,

hukum panglima madya begitu kira-kira. Jadi tetap harus pendidikan.

Nah ini momentumnya bagus saya me-refer dua *statement* dari pemerintah dan dari DPR. Yang pertama dari presiden terpilih Pak Prabowo ketika beliau merespon *statement* dari Pak Dede sebagai pimpinan Komisi X. Yang pertama dulu dari Pak Prabowo begitu sebaiknya perguruan tinggi ini gratis sebaiknya, ini baru presiden terpilih nanti kalau sudah dilantik beliau akan mengatakan seharusnya.

Nah itu tinggal diapresiasi oleh DPR dan Pak Dede mempertanyakan apa itu 20%. Jadi saya sangat bangga kepada DPR kepada semua pimpinan dan anggota Komisi X yang terus berjuang agar betul-betul yang 20% ini bukan sekedar retorika, jangan sekedar hanya kita meletak mampu meletakkan di konstitusi tapi implementasinya kita mendapat cibiran begitu dan tadi dielaborasi oleh Pak Dede ternyata bukan 20%.

Nah itu yang di lingkungan Kemendikbudristek apalagi yang di Kemenag ini nih ada Pak Purnomo ya, Purnama Purnomo, ini ada Bu Ledia nih aduh senior saya nih Bu Ledia dulu sama-sama pimpinan Komisi VIII, *nah* jadi itu sekali lihat sekali gitu.

Jadi KIP-nya ini pak KIPK-nya itu kalau di ini tuh 1000 ya untuk satu perguruan tinggi umpamanya kalau di tempat Kemenag itu hanya 17 Pak 21 perguruan tinggi itu dapatnya itu, mahasiswanya maksudnya dapat bantuan itu yang jatahnya itu Pak sampai begitu. Itu pun tapi di sana *nggak* ada peran anggota dewan begitu ya, itu sedikit sekali tapi *alhamdulillah* yang di sini kita bersyukur tapi itu perlu ditambah lagi ya yah.

Jadi usulannya antara lain bagi bagaimana ini bisa di carikan solusi jadi ada *big issue* tadi soal 20% ini dari soal-soal kedinasan, bahkan dari sisi kelembagaan ini juga ada problem ini dulu ada wacana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini atau misalkan itu bergabung dengan pendisnya Kemenag dan sebagainya, itu ada menteri juga kementerian Pendidikan Tinggi Ristek dan Teknologi begitu. Karena kalau hanya kita maaf kita *alhamdulillah* di Dikdas ya Dikdasmen ini sudah bersedesah sedikit-sedikit gitu tapi pendidikan tinggi ini sangat riskan dan ini tidak mungkin kita dasarnya kalau *output*-nya seperti apa dituntaskan gitu menurut saya jadi biaya ini mahal tetapi itu memang kewajiban negara.

Saya rasa itu Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian nanti untuk informasi lebih lanjut detail dan usulan detail nanti akan disampaikan oleh rekan kami dari Al Washliyah, demikian.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Mau dilanjut Al Washliyah oh nanti diskusi ya.

Baik luar biasa nih kita cukup dapat masukan yang paling tahu

sebenarnya Pak Ainun anggaran Kemendikbud itu terkena Undang-Undang Keuangan ya Pak ya keuangan negara Pak ya.

Jadi kita itu *given* Pak 20%-nya itu dibaginya oleh Bapenas dan Kementerian Keuangan betul Pak Ainun ya? Jadi bukan Komisi X itu sebabnya kami melihat bahwa perlu ada dorongan dari *stakeholder* pendidikan, agar pada saat kita berbicara distribusi itu bukan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atau Bapenas tapi oleh ya yang berurusan dengan pendidikan yaitu Menteri Pendidikan.

Jadi apapun yang kita akan dorong rekomendasi nanti tambahkan lagi beasiswa bantuan-bantuan tapi kalau alokasi anggarannya segitu-gitu saja itu pasti *nggak* akan bergerak. *Nah* justru kita *pengin* cari tahu, *nah* untuk itu kita mulai diskusi saja kawan-kawan sudah siap ini untuk bertanya Pak Rano Karno dimulai.

Silakan Pak Rano.

F.PDIP (RANO KARNO, S.IP):

Terima kasih Pak Ketua.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Bapak-Bapak yang sangat luar biasa ini,

Saya ingin mohon izin untuk minta maaf, karena pasti pertanyaan saya salah. Saya menjadi anggota DPR Komisi X ini ini periode pertama tapi pada waktu saya menjadi anggota DPR saya minta kepada Ibu Ketua Umum, saya masuk di Komisi X karena saya merasa *core* saya ada di situ saya membuat sebuah sinetron judulnya "Si Doel Anak Sekolahan.

Saya sangat tahu sekolah atau pendidikan itu sangat penting tapi Haji Sabeni bapaknya Si Doel itu mengkuliahkan Si Doel *tuh ngap-ngapan* sampai jadi sopir oplet, jual tanah, itulah ilustrasi saya tentang dunia pendidikan di Indonesia.

Saya awali dengan minta maaf Pak, pasti pertanyaan saya salah, setelah saya masuk di Komisi X, kita semua masuk era yang paling gelap pandemi Covid 3 tahun. Kami mungkin masuk ke ruangan ini pak kalau di total *nggak* lebih dari 1 tahun setengah sisanya semua kita *virtual zoom*, bahkan Pak 18 Pak staf kami di sini meninggal dunia, artinya begitu berat pendidikan yang kita hadapi.

Nah sekarang kita ada di ujung masa jabatan, maaf kami *alhamdulillah* ada sebagian yang lanjut di tempat ini tapi ada yang selesai tapi kami Komisi X ini membuat Panja tentang pendidikan. Karena kami tahu orang tua kami mendidik anak-anak dengan susah payah, itu yang kami *nggak* mau. Sebelum kami pergi maaf Pak saya jadi anggota DPR lagi belum tahu *nih* besok saya

dimana. Apakah Komisi X atau saya ditugaskan komisi lain tapi Komisi X ingin mempunyai produk yang disebut Panja Pembiayaan Pendidikan, kami sangat sadar 20% undang-undang ini tidak ada di kami, sadar Pak.

Saya awali saya minta maaf, selama saya jadi anggota DPR saya dulu sudah dapil Banten Pak, kebetulan saya pernah jadi gubernur di Banten. Kita tahu ilustrasi Banten sekolah religi madrasah banyak pesantren banyak. Sebagai anggota Komisi X Pak, saya tidak bisa membantu karena itu wewenangnya di Kementerian Agama.

Nah saya minta maaf bukan berarti saya menghitung yang lain tidak besar dan tidak kecil, saya melihat dua Nahdlatul dan Muhammadiyah ini saja luar biasa bebannya, luar biasa bebannya Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama 282 prodinya 1.196 dosennya 12.000 mahasiswanya 352.000 sekian.

Dua kriteria Pak, pertama golongan ekonomi menengah ke bawah 67% kedua tidak mampu 32%. Yang mampu berapa persen ya, saya bertanya saya catat di sini. Apakah dapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, maaf kami tidak pernah berhubungan dengan Kemenag itu Komisi VIII kita di Komisi X.

Tapi kita ingin tahu *hole* pendidikannya ada di mana *sih*? Betul yang tadi bapak bilang STAN kuliah dibiayai lulus pasti kerja, berebut Menteri Keuangan atau di pajak, betul STPDN di semua fakultas ada gitu. Ini yang kira kita tanya ini salahnya di mana *sih*, bahkan kami pak untuk renovasi sekolah saja kita *nggak* bisa punya fasilitas untuk membantu karena itu ada di PUPR. Banten banyak sekolah yang *nggak* ada WC Pak.

Saya minta maaf dulu pada waktu saya jadi gubernur makanya bantuan provinsi kepada sekolah yang berbasis masyarakat ini, maaf saya anggap cukup tinggi setelah itu tidak ada lagi Pak. Saya minta maaf Bapak boleh cek seumur ter berdirinya Provinsi Banten dari tahun 2000 sejak Gubernur Rano Karno menjadi juara umum MTQ setelah itu sampai sekarang menjadi nomor 24 Pak, itu hanya satu *frame* yang ingin saya ceritakan.

Nah karena itu saya minta maaf Muhammadiyah ini begini banyak makanya saya ini berapa besar bantuan negara. Kami punya aspirasi Pak ada PIP ada KIP tapi kita *nggak* bisa membantu anak-anak yang memang di sekolah agama IAIN kita *nggak* bisa bantu, *nggak* boleh karena itu ada di Kementerian Agama.

Nah itu juga membuat kita ini Komisi X, ini sesuatu yang kita lakukan. Saya minta maaf tadi pak ketua mengatakan rekomendasi Persis itu sudah saya catat ini Pak sebelum Pak Ketua bicara. Wah udah ketemu ini jawaban bagaimana caranya mengembalikan 20% itu berarti yang lain juga juga mencatat itu tapi mungkin tidak tersebut. Saya catat ini yang tadi Bapak bacakan rekomendasi Persis itu sudah jatuh kita ketemu bagaimana cara kita mengembalikan.

Nah artinya Pak terakhir, kita tidak tahu pak pemerintah akan berganti apakah keperintahan besok masih tetap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena ada indikasi mau dibelah nih Pak. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan, itu juga kita antisipasi ini Pak. Nih setelah ini bagaimana ini maaf maaf ini memang DPR nih kan tempat politik yang kita antisipasi. Ini yang namanya makan gratis ada di mana dititip di BOS kah BOS aja segini apalagi ditambah lagi ini kan, itu yang juga kita sedang berhitung Pak. *Nah* jadi sekali lagi saya berterima kasih sebagai ya anggota yang baru, saya merasa bangsa ini harus dikejar dari sudut pendidikan apa pun konsekuensinya.

Yang terakhir barangkali saya minta maaf mungkin pertanyaan saya agak nakal saya catat di sini, saya berharap mudah-mudahan dengan diberikannya konsensi pertambangan bagi ormas ormas itu bisa membantu. Saya mencatat Pak saya tidak tahu, apakah semua yang ada di ini yang mendapat konsensi pertambangan kalau itu mudah-mudahan bisa membantu operasional mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

*Wabillahit taufiq wal hidayah,
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Jadi Bang Rano, Bang Rano setuju kalau ormas punya tambang ya, mudah-mudahan tambang yang benar-benar ada isinya Pak, jangan *nggak* ada isinya.

Silakan siapa lagi ibu Ledia.

F.PKS (LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.):

Baik terima hasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan anggota Komisi X yang berbahagia,
Bapak-Bapak dari ormas Islam yang hadir dan telah memberikan penjelasan ke kami,**

Saya Ledia Hanifa dari Fraksi PKS Dapil Jawa Barat 1 Kota Bandung Kota Cimahi tetangga Pak Deding.

Alhamdulillah Jaza Kumullahu Khoir hatur nuhun.

Terima kasih atas penjelasan dan keterbukaan Bapak-Bapak.

Karena selama ini kita hanya melihat dari permukaan dan segala

keterbukaan yang tadi disampaikan ada persoalan-persoalan itu kita bisa dapatkan sekarang, termasuk juga terima kasih atas rekomendasi-rekomendasinya secara detail bisa didapatkan. Ada hal yang masih ingin didalami oleh kami adalah karena ini berkaitan dengan ormas Islam.

Ada satu pertanyaan ya bisakah kami dibantu dengan persandingan karena kami *nggak* mungkin masuk ke yang ada di Komisi VIII, bisakah kami dibantu dengan persandingan di bawah ormas Bapak Bapak ini kan ada yang di bawah Kementerian Agama dan bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya kami nanti bisa melihat sebab waktu kami saya dan Pak Deding di Komisi VIII dulu, saya pernah di Komisi VIII 86% anggaran di Kementerian Agama adalah untuk pendidikan.

Dan prosentase jumlah APBN untuk Kementerian Agama itu terhitung yang paling besar, bukan paling *sih* ya cukup besar gitu ya, sedikit di bawah Kementerian Pendidikan. Jumlah sekolah negerinya madrasah negerinya rata-rata di tiap kota kabupaten hanya dua, satu dua satu dua sementara yang swastanya itu lebih banyak sebaliknya nya yang di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang negerinya 80% sisanya swasta sehingga kan ada ada yang terbalik gitu perbandingannya terbalik.

Nah kami perlu bantuan untuk bisa mendapatkan gambaran *rill*-nya di lapangan, sesungguhnya bagaimana yang bisa didapat oleh. Didapat tuh konteksnya gini bantuan dari Kementerian Agama dan bantuan dari Kementerian Pendidikan supaya kami nanti lihat proporsinya, dengan melihat proporsi itu kami bisa merumuskan sebaiknya nanti akan seperti apa bagusnya APBN kita.

Tadi dari Persis sudah menyampaikan bahwa yang kedinasan sebaiknya tidak usah dibawa di fungsi pendidikan, ini sudah udah menguat ya Pak Ketua. Sudah berkali-kali kan kita mengusulkan juga hal-hal yang tidak terkait langsung sebaiknya jangan dimasukkan ke bawah fungsi pendidikan kenapa. Karena satuan biaya per mahasiswanya di yang sekolah kedinasan itu jauh lebih besar daripada satuan biaya yang ada di bawah Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan.

Sehingga ini *teh jomplang* kalau kata orang itu, jadi ini terlalu besar ini kecil gitu. *Nah* ada yang besarnya di seragamnya gitu ya mohon maaf lahir batin gitu kan ada kampus-kampus yang kudu diseragam, kalau *nggak* diseragam *nggak* boleh masuk dan lain sebagainya. Sementara yang lain komponen itu tidak masuk dalam fungsi pendidikan dasar agama harusnya bukan fungsi pendidikan kalau buat perguruan tinggi gitu kan. *Nah* jadi bab-bab begini ini kami berterima kasih tadi keterbukaan Bapak Bapak-Bapak menyampaikan masukan-masukan itu menjadi bagian yang penting.

Yang ketiga kan tadi juga disampaikan bahwa kami berulang kali menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tidak ada BOTS Bantuan Operasional PTS walaupun ada walaupun ada bantuan itu tentu bukan Bantuan Operasional. Selama ini adanya adalah hibah penelitian

dan lain sebagainya, sementara kita punya sejumlah perguruan tinggi negeri yang sekarang berlomba-lomba menjadi PTNBH dan kalau di hitungan. Tadi *ngobrol-ngobrolan* Pak Purnomosidi hitungan BPK harusnya PTNBH itu apa kira-kira memerlukan 11.000.000.000.000 untuk operasionalnya sementara yang dibantu oleh pemerintah 2,9 triliun.

Jadi dia ada *gap*-nya sangat besar mau tidak mau akhirnya mereka menaikkan UKT *nggak* bisa dijadikan pembenaran sih tetapi berarti ketidakhadiran pemerintah itu jadi terbukti gitu. Apalagi kepada swasta padahal sudah ditawarkan satu konsep *public private partnership*, nah kan.

Saya beberapa bulan lalu, kebetulan anak saya punya kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram misalnya dengan penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Itu kan juga dilakukannya tidak sepenuhnya menerima apa *matching fund* dari Kementerian Pendidikan, karena ada juga *private* yang memberikan dana untuk melakukan apa penelitian-penelitian itu.

Jadi pada dasarnya ketika konsepnya itu diratakan dipahami oleh semua itu akan menjadi lebih, mudah-mudahan akan menjadi lebih lebih adil lebih lebih mudah untuk diimplementasi.

Saya pikir sekali lagi terima kasih, catatan saya tadi hanya satu Kang Dede, minta bantuan untuk tadi masing-masing ormas kan ada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, ada sekolah di bawah Kementerian Agama boleh *nggak* dibantu disandingkan. Agar kami bisa tahu berapa sih besarnya sebetulnya satuannya yang didapat bantuan melalui Dikbud dan melalui Kementerian Agama, supaya nanti kita bisa menghitung pembiayaan kebutuhan pembiayaan pendidikan sesungguhnya berapa.

Terima kasih.

*Jazakumullah khair,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Makasih Teh Ledia.

Ibu Eliza silakan.

F.PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL,S.E.) :

Ya saya singkat aja Kang karena jam 3 kita nanti akan ada rapat lagi.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Hamdan wa syukran lillah sholatan wa salaman ala rasulillah wa 'ala alihi wa,
sohbihi wa mawwalah, syukur kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah,*

Pimpinan dan seluruh anggota Komisi X,

f

**Seluruh para kiai,
Para akademisi yang luar biasa hari ini hadir di Komisi X,**

Tapi saya singkat saja karena memang dari paparan yang telah disampaikan tadi, sudah banyak solusi yang ditawarkan persoalan yang sudah dipaparkan. Karena di sini ada Pak Ainun yang menjadi guru saya juga di Komisi X, mohon maaf izin Pak Ainun saya ingin sekali Bapak bisa menyampaikan tentang pemanfaatan 20% itu Pak.

Jadi selama ini kan mungkin Bapak ada di dalam sistem itu, sementara 20% yang disampaikan kewajiban untuk pembiayaan pendidikan secara mandatori itu kan harusnya dimanfaatkan benar-benar seluas-luasnya untuk secara ya untuk pendidikan tidak secara infrastruktur dan sebagainya.

Nah kira-kira solusinya Pak mungkin kalau 20% ini dimaksimalkan benar-benar dimanfaatkan untuk hanya yang pendidikan secara akademiknya, tentu baik kesejahteraan guru, baik juga pembiayaan pendidikan itu akan teratasi. Bahkan mungkin untuk makan gratis juga bisa bisa disalurkan melalui itu gitu, tapi kalau dimanfaatkan untuk infrastruktur, dibagi sana, dibagi sini.

Jadi sebetulnya itu kecil sekali kue yang kita dapatkan. *Nah* karena kita selama ini kan persoalan pendidikan Indonesia masih punya ketimpangan kesenjangan yang hanya diakses oleh peserta didik itu yang menengah ke atas yang akan mendapatkan pendidikan yang lebih maksimal dengan fasilitasi yang maksimal.

Tapi sementara mereka yang kurang mampu, ya katakanlah KIP kuliah itu kan juga dibagi-bagi per wilayah jumlah biaya berbeda-beda yang bisa diakses juga jumlahnya juga cukup kecil gitu. Sementara kebutuhan cukup besar, kita lihat saja jumlah sekolah SD jauh lebih besar dibanding sekolah SMP. SMP jauh lebih besar dibanding SMA kuliah apalagi, jadi kita bisa lihat 12 tahun itu itu, apakah bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tentu belum.

Nah oleh sebab itu dengan adanya Panja ini *insyaallah* kami-kami yang ada di Komisi X hari ini ingin berkontribusi untuk menyiapkan apa yang, menyampaikan kepada pemerintah yang akan melanjutkan nanti ke depan ini yang harus mestinya dilakukan. *Nah* kenapa para, mungkin ormas hari ini yang kita hadirkan karena selama ini perhatian pemerintah terhadap swasta itu kecil sekali, sementara swasta itu berkontribusi jauh lebih besar di awal dibanding keberadaan pendidikan yang berbasis dari pemerintah itu sendiri. Katakanlah BOP tadi juga tidak mendapatkan biaya operasional.

Kemudian ada kebijakan katakanlah peningkat untuk menampung P3K ternyata tidak dikembalikan ke swasta kembali, padahal dulu undang-undangnya memperbolehkan. Dulu kita pernah mendapatkan guru dari PNS itu dipekerjakan di swasta, tapi justru sekarang ini justru terbalik yang swasta sudah berkontribusi ternyata si PNS itu *nggak* bisa ditempatkan.

Partisipasi pemerintah perhatian pemerintah terhadap kontribusi besar yang telah diberikan oleh swasta untuk Indonesia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktu yang sangat terbatas.

Terima kasih sekali kepada apa para pakar, kami yang sudah berkontribusi luar biasa pada hari ini dan mohon maaf kalau banyak hal-hal juga yang kami masih belum bisa apa, memenuhi memperjuangkan kebutuhan itu.

Walaupun kami sudah cukup paham masalah-masalah yang ada, tapi secara Panja ini akan lebih berkontribusi lebih konkret dari masukan-masukan yang kami dapatkan pada saat ini, terima kasih.

*Wafamikum astagfirullahu lakum,
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Eliza Prof Zainudin.

Mewakili Muhammadiyah.

F.PAN (Prof. ZAINUDDIN MALIKI,M.Si.) :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Kang Dede,
Pimpinan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X, beserta kawan-kawan,
Bapak-Bapak dari pegiat pendidikan berbasis masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan,**

Karena kami juga juga latar belakangnya pegiat pendidikan juga pernah jadi Rektor Universitas Muhammadiyah di mana jadi mewakili, di Surabaya. Jadi saya melihat semangat *survival*-nya perguruan tinggi swasta atau lembaga pendidikan swasta itu menurut saya luar biasa. Andai kata etos kerja yang dimiliki oleh pegiat pendidikan berbasis masyarakat ini juga dimiliki oleh perguruan tinggi negeri, saya kira kita tidak akan sempat menemukan masalah seperti yang sekarang ini.

Lagi-lagi apanya, menjadi penyebab kegaduhan, karena ada kenaikan UKT. Perguruan tinggi negeri kita sekarang ini kan diminta oleh pemerintah untuk menjadi perguruan tinggi negeri yang mandiri dengan ingin memperbanyak PTNBH, tetapi karena semangat *survival*-nya tidak seperti yang dimiliki oleh pengelola pendidikan berbasis masyarakat, akhirnya satu-satunya sasaran adalah mengambil sumber dana dari mahasiswa UKT.

Kalau seorang rektor perguruan tinggi swasta mengandalkan anggarannya dari UKT, saya kira dia tidak akan bisa bertahan lama sebagai

rektor dan tidak akan bisa mengembangkan sarana pendidikan yang, yang ada.

Oleh karena itu sebenarnya yang kita gali melalui forum ini, bagaimana kita mengangkat etos kerja pengelola pendidikan berbasis masyarakat itu supaya juga dimiliki oleh pimpinan-pimpinan perguruan tinggi atau pendidikan pemerintah itu, ini yang kita inginkan *spirit* itu.

Nah kita juga sudah mendapatkan masukan penerimaan dana pendidikan tinggi baik dari Muhammadiyah, dari NU Al Washliyah dan juga Persis, sumbernya itu jelas tidak hanya mengandalkan UKT.

Bahkan sebenarnya menurut hemat kami, kalau, kalau memang perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi kita ini serius berkualitas sebetulnya banyak banyak peluang untuk mendapatkan sumber dana di luar UKT.

Kemarin ketika Covid itu misalnya Universitas Airlangga itu punya temuan vaksin, temuan vaksin tetapi rupanya oleh pemerintah diminta untuk uji klinis dan syaratnya uji klinisnya sangat berat, minta di diuji cobakan ke 3.000. Uji klinis 300 saja susah ini 3.000. Sehingga kemudian biayanya mahal lama tapi tetap saja diperjuangkan tetapi begitu selesai uji klinis Covid-nya sudah pergi Pak, itu yang terjadi

Jadi sebenarnya kami melihat pendidikan tinggi kita, baik negeri dan juga swasta saya lihat punya potensi untuk melakukan sumber mendapatkan sumber-sumber pendanaan antara lain melalui riset gitu. Kalau riset Covid itu selesai pada waktunya ketika dibutuhkan, pemerintah kita *nggak* perlu impor berbagai jenis vaksin itu dan masyarakat kemudian perguruan tinggi kita kemudian mendapatkan sumber dana, riset-riset yang lain. Saya kira juga begitu.

Saya baru saja pulang dengan dipimpin oleh Kang Dede ke Finlandia ketemu seorang mahasiswa doktor, program doktor dari Indonesia, dari Indonesia dia di-*hire* oleh seorang supervisor, seorang profesor mendapatkan anggaran riset di bidang kesehatan. Yang membiayai, siapa yang membiayai rumah sakit dan supervisor ini bisa meng-*hire* 10 sarjana apa namanya, mahasiswa S3 10 orang dan dua yang S2. Satu bulan di-*hire*, 3.000 Euro dari dana riset itu.

Nah andai kata perguruan tinggi kita punya kreativitas seperti itu saya kira kemudian sumber dana itu tidak hanya mengandalkan UKT. Tapi rupanya untuk ke sana kita masih harus punya komitmen peningkatan kualitas yang tinggi.

Yang terakhir saya ingin juga problem yang kita hadapi di Komisi X adalah distribusi alokasi anggaran 20%, *nah* bagaimana alokasi itu kemudian benar-benar fokus gitu ya. Kita tahu anggaran yang dikelola oleh Kemendikbudristek itu hanya 15%, angkanya 2024 ini 98,9 triliun dikelola oleh Kementerian Agama sebesar 9% angkanya 62 triliun, kementerian/lembaga itu 5% angkanya 32 triliun, cukup besar.

Tetapi yang menjadi persoalan adalah Kemendikbud tidak bisa ikut mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran itu. Padahal ada ketentuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga dan yang lain itu harus mengikuti standar biayanya Kemendikbudristek. Tapi Kemendikbudristeknya tidak bisa melakukan tugasnya mengkoordinasikan dan dan mengawasi.

Sehingga kemudian Bapak tadi cerita di STAN itu gratis, kemudian dapat fasilitas, bahkan ada satu lembaga pendidikan yang PKL-nya saja ke luar negeri, luar negeri, yang pendidikan tinggi kita tidak tidak bisa melakukan itu.

Nah ini ini yang sebetulnya jadi konsen Komisi X, bagaimana mendistribusikan dan mengalokasikan anggaran 20% mandatori itu supaya kemudian tujuan pendidikan nasional kita bisa diwujudkan dengan baik. *Nah* sekarang belum fokus, sehingga banyak masalah yang muncul.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

Asslamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih Prof.

Jadi Prof Zainudin kemarin pernah cerita kepada saya begini Pak, kalau di luar negeri itu perusahaan datang ke perguruan tinggi, meminta agar perguruan tinggi melakukan riset untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Kalau kita kebalik Pak, riset dilakukan atas dasar sesuatu yang *nggak* dibutuhkan oleh industri. Sehingga akhirnya risetnya tidak terpakai di industri.

Tentu akhirnya jadinya tidak ada tunjangan dari luar, mungkin pola-pola seperti ini perlu kita perbaiki ya. Jadi misalnya kita berbicara tentang bagaimana caranya mengurangi makan karbohidrat nasi menggantinya dengan makanan-makanan yang katakanlah tidak mengandung gula. Itu kan dari dulu sudah kita lakukan, tapi tidak dilakukan riset bagaimana caranya membuat makanan yang alternatif itu menjadi lebih enak daripada daripada beras misalnya atau daripada nasi itu, itu belum ada risetnya. Kalau ada risetnya misalnya perguruan tinggi ditemukan, mungkin itu akan jadi industri yang begitu besar gitu. Ibu Lisda mungkin mau memberikan masukan.

Silakan oleh-oleh dari Finland.

F.P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E.,MMTr.):

Ya baik terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi X,
Yang saya hormati saya banggakan,
Seluruh narasumber Bapak-Bapak pakar ya dari PBNU PP
Muhammadiyah,
PB AI Washliyah, dan PP Persis,**

Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak-Bapak semua dan kami mendapatkan banyak sekali apa masukan ya, berupa persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi di lapangan yang sebenarnya kami sendiri di Komisi X dan saya juga 3 tahun di Komisi VIII juga sudah cukup tahu permasalahan. Dan saya sempat berpikir begini Pak, ini teman-teman, karena saya baru periode pertama ya, ini teman-teman ini ngapain aja gitu ya?

Karena permasalahan-permasalahan ini sudah sejak lama gitu ya. Ternyata memang baik itu di Komisi X memang dan juga di Komisi VIII sudah berjuang Pak. Makanya tadi mungkin yang dari 20% tadi di mana nih salahnya gitu ya?

Kalau dilihat dari undang-undang sudah memenuhi bahwa memang harus 20%, tapi kenapa kok tidak cukup mungkin ke mana nih anggaran harusnya gitu ya? Artinya itu harusnya lebih fokus kepada biaya pendidikannya saja dan juga apanya lagi ya supaya jangan sepertinya besar 20%, tapi sebenarnya tidak, tidak tepat sasaran yang seperti kita harapkan seperti itu.

Ya kalau kita lihat bahwa kalau undang-undang sih sudah jelas menyampaikan, bahwa apa pendidikan ini memang adalah hak warga negara dibiayai oleh negara. Jangankan yang perguruan tinggi ya Pak, ya dari yang paling dasar saja, dari SD saja, orang tua tuh banyak sekali, karena kami ada di lapangan Pak, tahu ya keluhan-keluhan masyarakat. Katanya sekolahnya sih gratis tapi uang komite aja bisa jadi masalah untuk mereka. Belum lagi pakaian apa seragam dan lain-lain juga ternyata itu masih menjadi permasalahan dari keluarga-keluarga Indonesia gitu.

Nah dengan adanya Panja Biaya Pendidikan ini, kita punya waktu *insyaallah* 3 bulan ke depan Bapak-Bapak. Tentu apa yang Bapak-Bapak pahami dan yang betul-betul ya, bergelut di bawah tahu persis seperti apa tentu ini kita terus harus bergandengan sampai selesai. Karena kita berharap pada periode ini, kami juga dapat bisa berkontribusi di dalam Panja ini. Sehingga apa-apa yang menjadi permasalahan selama ini, menjadi PR kita bersama, dapat terselesaikan satu persatu.

Dan tentunya kita dapat memastikan, bahwa baik itu biaya pendidikan, baik itu permasalahan sarana prasarana, kualitas guru-guru kita, yang apakah sudah memenuhi dari kompetensi ya daripada guru, baik itu secara pedagogiknya, profesional, kepribadian sosial, itu apakah mereka juga sudah memenuhi itu.

Dan tentu kita harus memastikan untuk semua ini tidak menjadi hambatan lagi ya ke depannya bagi pendidikan dan juga menjadi pendidikan yang merata dan juga berkualitas untuk bangsa Indonesia.

Dan kalau kita melihat kemarin, kami baru pulang dari Finlandia Pak, memang di sana kan pendidikan terbaik di dunia ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat waktu kami menyampaikan sekian jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah pulau 1.700 gitu, mereka pun terkaget-kaget gitu, karena jumlah penduduk mereka cuma sepertiganya Jakarta lah Pak.

Ya jadi itu juga mungkin kita belajar ke mereka. Mereka pun juga kalau disuruh ke sini pusing juga gitu ya Pak ya, *nggak* mau suruh menyelesaikan di sini juga, pusing. Jadi memang kita harus menyelesaikan sendiri Pak ya.

Tentu *insyaallah* secara bergandengan kita dapat menyelesaikan permasalahan ini ke depannya. *Insyaallah* lebih baik bagi pendidikan di Indonesia.

Terima kasih.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bang Nur ada yang mau disampaikan?

F.P GERINDRA (Ir. H. NUROJI) :

Ya, sedikit saja.

**Pimpinan yang saya hormati dan Anggota,
Para undangan dari Ormas,**

Iya persoalan 20% ini sudah lama di Komisi X dibicarakan ya dan dituntut ya menuntut kepada pemerintah untuk men-*share*-nya lebih banyak kepada fungsi pendidikan yang berada di Kementerian Pendidikan ya. Bahkan sempat ada *judicial review* yang ingin gaji guru itu dikeluarkan dari fungsi pendidikan, namun di tidak dikabulkan ya waktu itu.

Itu juga hampir setiap periode ya saya mengikuti 2012 sudah teman-teman di Komisi X ini ya gigih mempertanyakan porsi atau profil, apa profil fungsi anggaran. Profil anggaran fungsi pendidikan ya yang yang selama ini kita lihat banyak tersebar di K/L dan lembaga lain itu.

Bahkan terakhir juga ada usulan dari kita di Komisi X untuk menyatukan fungsi-fungsi pendidikan yang ada di kementerian tadi itu, kedinasan ditarik ke dalam Kementerian Pendidikan, supaya benar-benar fungsi pendidikannya berjalan secara adil tadi secara anggaran. Ya lagi-lagi ya, kita berhadapannya dengan pemerintah. Pemerintah tidak mengabulkan gitu ya.

Kalau soal 25% tadi, dengan segala argumentasi hukum segala macam, Komisi X saya ingat betul Pak Kahar ya? Pak Kahar ini gigih sekali ya dari Fraksi Golkar waktu itu. Ya sampai semua undang-undang dia buka, memang harus masuk ke dalam kementerian gitu ya. Tapi pemerintah akhirnya menjawab ya, kementerian dan lembaga lain tidak punya uang untuk membiayai. Jadi itu ya alasannya, karena tidak cukup uangnya kalau menurut saya ya. Jadi kita perjuangkan dulu ini uangnya ada *nggak* untuk bisa 25% gitu ya. *Nah* itu kemudian terutama waktu itu Kementerian Agama yang juga keberatan juga bergabung dengan apa madrasahnyanya ditarik ke kementerian.

Mungkin Pak Ainun ingat waktu itu ya, perdebatan sementara lembaga-lembaga pendidikan yang di non Dikbud itu ditarik ke Dikbud ini. Sudah pernah dibahas juga Pak di sini. Ya sudah banyak lah, upaya untuk memenuhi harapan undang-undang dasar tadi. Ya menurut pandangan saya sumbernya mungkin tidak cukupan dana kali ya. Saya kira itu. Sehingga Kementerian lain masih membutuhkan masih perlu dibantu dari anggaran 25% itu mungkin. Itu kira-kira pandangan saya Pak Ketua, 20% ya, *sorry*.

Makasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih saya tambah 15 menit waktunya ya.

Sayang ini, saya mau memberikan sebuah pertanyaan, tapi terima kasih ini teman-teman semua sudah mulai menggambarkan. Arah Panja ini sebetulnya adalah kita pengin memberikan *legacy* Pak kepada pemerintahan selanjutnya. Karena dalam waktu 4 bulan tentu kita juga belum tentu bisa merubah banyak. Tapi sebagaimana Pak Deding tadi katakan, presiden terpilih sudah menyampaikan pendidikan tuh harusnya begini.

Nah ini harus kita siapkan. Kalau kita tidak siapkan kisi-kisinya, nanti takutnya yang menentukan nanti Kementerian Keuangan lagi atau Bapenas.

Nah itu makanya saya mau tanya kepada Pak Ainun di sini, karena Pak Ainun cukup paham.

Apakah benar ada Undang-Undang Keuangan Negara atau apa saya lupa ya yang mengatakan bahwa semua Kementerian mendapatkan alokasi dari Kementerian Keuangan, lalu konteksnya nanti dengan Undang-Undang Dasar kita apa yang 20% itu, padahal di Undang-Undang Dasar dijelaskan yang berwenang adalah Kementerian bidang pendidikan. Jadi saya mau tanya satu poin itu.

Yang kedua, saya tertarik PTNBH. PTNBH ini adanya di Undang-Undang Dikti ya kalau *nggak* salah ya? Ya Undang-Undang Dikti ya. Kalau melihat dari kondisi yang ada sekarang, PTNBH ini sepertinya belum siap sepenuhnya untuk dilaksanakan. Karena tadi yang dikatakan Pak Prof kawan-

kawan di perguruan tinggi itu belum pernah menjadi pebisnis. Rata-rata akademik. Kira-kira gitu ya?

Nah kira-kira ada metode apa yang ini kaitannya lagi yang *public private partnership* untuk memperkuat yang sifatnya tidak hanya melulu subsidi atau bantuan keuangan? Apa yang diharapkan dari ormas ini?

Saya tertarik, misalnya pengurangan pajak aset pendidikan ya kan atau insentif atau juga guru dosen, gaji itu. Jadi kita cari ruangnya nih ya. Kemudian dukungan pemerintah, saya pikir selain ada KIP, PIP, ada BOS dan lain-lain ya. Tapi sekarang juga ada masalah baru ini ternyata PIP dan KIP hanya untuk DTKS, padahal yang *enggak* mampu lebih banyak daripada yang DTKS Pak. Jadi kayaknya kita perlu dukungan dari ormas juga *nih* untuk mengatakan apa iya semuanya harus DTKS ya?

Karena kalau kita lihat UMR rata-rata di daerah itu di bawah 4 juta. Artinya semua masyarakat anak-anak yang ada di sana itu termasuk bagian golongan yang tidak mampu ya.

Kemudian alokasi distribusi kira-kira berapa persen sih yang perlu diberikan kepada Kementerian Pendidikan dari alokasi yang 20%? Kan saat ini kan sekitar 14, 15% dari 20% kira-kira rasio yang logis berapa sih?

Karena yang jelas Kementerian lain K/L lain saja itu sudah 20 sekian persen ya. Terus kemudian transfer keuangan daerah itu 50%, lalu kemudian juga ada BABUN dan lain-lainnya juga cukup besar.

Nah kira-kira kalau menurut Bapak-Bapak, berapa persen *sih* sebetulnya untuk Kementerian Pendidikan yang mestinya bisa dialokasi langsung sehingga permasalahan ini bisa kita selesaikan?

Dan kemudian mengenai transfer keuangan daerah saya mungkin harus kembali ke Pak Ainun lagi pertanyaannya, ada *nggak* sih laporan? Dari tadi kan katanya sampai ke desa ya dana pendidikan sampai ke desa ya? Ada laporan *nggak* sih sebenarnya itu untuk apa saja sih dan *output*-nya apa? Apakah indeks pendidikannya naik APK-nya naik atau apa itu saya perlu tahu.

Silakan mungkin bisa Bapak-Bapak memberikan pandangan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan anggota.

Dimulai dari NU dulu Pak.

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Baik terima kasih.

**Bapak Ketua dan anggota Panja Pendanaan Pendidikan,
Serta Bapak Ibu dari ormas-ormas Islam,**

Secara umum yang kita bahas ini adalah pertama bagaimana meningkatkan alokasi dana pendidikan. Memang kalau kita lihat secara statistik secara global ya, biaya pendidikan atau alokasi dana pendidikan kita per siswa atau per mahasiswa itu di antara yang terendah, di antara berbagai negara mungkin terendah ketiga atau terendah keempat. Itu saya lihat beberapa tahun yang lalu dan sekarang belum banyak perubahan.

Baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh masyarakat itu yang termasuk yang terendah per siswa. Ya alokasi dana per siswa dan kita tahu ya alokasi dana ini berhubungan dengan kualitas pendidikannya kita bisa lihat.

Nah sekarang kalau dari pemerintah bagaimana menjawab pertanyaan Bapak Ketua tadi, memang dalam peraturan perundangan tidak hanya Undang-Undang Keuangan tapi juga Undang-Undang Pendidikan dan Undang-Undang Dikti sendiri, kita itu tidak berhasil mengintegrasikan fungsi pendidikan di Kemendikbud. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur juga.

Ya jadi waktu itu, ketika tahun 2012 kita membahas Undang-Undang Dikti, Kementerian lain itu tidak setuju kalau ada klausul bahwa semua fungsi pendidikan diatur atau dipimpin oleh Menteri Pendidikan. Jadi masing-masing Kementerian Agama dan lain-lain itu masih tetap ingin mempertahankan apa fungsi pendidikan yang mendukung tugas dan tugas mereka gitu, tugas dan wewenang mereka, sehingga terjadinya seperti itu.

Nah memang masih ada peluang sebetulnya untuk meningkatkan alokasi dana untuk Kemendikbud, yaitu apa LPDP dana yang dialokasikan ke LPDP itu sebetulnya menunda alokasi dana atau anggaran untuk pendidikan.

Kalau LPDP kan di investasikan yang digunakan hanya hanya hasilnya dan itu nilainya kan cukup besar juga. Dulu memang awalnya LPDP ini atau *endowment fund* pendidikan ini di dibangun untuk menampung anggaran pendidikan yang sisa. Tapi sekarang kan lebih dari itu ya dari SILPA iya.

Tapi sekarang kan memang dialokasikan untuk bahkan kan sekarang nilainya sudah 100 triliun lebih saya, saya dengar. Itu artinya apa artinya anggaran pendidikan yang mestinya digunakan sekarang. Karena kita memang butuh sekarang. Akibat orang apa namanya hidup itu kita kelaparan sekarang. Kenapa harus nabung untuk makan besok sekarang sudah lapar ini.

Jadi itu mesinnya bisa kita kurangi digunakan untuk yang *urgent* kita perlukan sekarang. Jadi masih ada peluang di situ saya kira dan ini apa, saya kira juga Kementerian Pendidikan ikut bisa menentukan dalam rapat-rapat di di Bapenas. *Nah*.

KETUA RAPAT:

Pak Ainun LPDP kan itu masuknya *domain*-nya sekarang di

Kementerian Keuangan. Betul, bukan di Kementerian Pendidikan.
NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Iya.

KETUA RAPAT:

Kita pun hanya bisa yang Isma itu program Isma itu?

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Iya betul.

KETUA RAPAT:

Arahannya gimana Pak?

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Iya tapi alokasinya kan ditentukan bersama ada rapat apa, rapat antar kementerian terkait dengan penetapan itu dan dan saya kira kita kan juga punya forum di Badan Anggaran untuk penentuan ini.

Kemudian yang kedua saya kira mengenai pajak tadi betul ya pada tingkat tertentu lembaga-lembaga pendidikan ini masih dikenakan pajak, padahal kalau di negara yang paling liberal pun, Amerika Serikat orang bayar untuk sekolah itu terpotong pajaknya, bisa di dianggap sebagai atau mengurangi kewajiban pajaknya gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu bayar uang kuliah anaknya itu bisa memotong kewajiban pajaknya.

Nah kita *nggak* gitu, kita malah ya fungsi pendidikan dikena pajak juga memang ada kriteria-kriteria, misalnya kalau digunakan untuk investasi tidak kena pajak lagi. Tapi kan itu ada perdebatan lagi. Kalau investasinya itu ke SDM *nggak* diakui gitu. Padahal investasi di SDM menyekolahkan dosen misalnya itu *nggak*, *nggak* bisa, tetap, tetap dihitung tidak diinvestasikan gitu.

Jadi itu juga saya kira, kita juga sudah lama memperjuangkan itu ke Kementerian Keuangan dan Diren Pajak gitu.

Kemudian tentang transfer keuangan daerah, jadi itu begini Pemda itu tanggung jawabnya kepada Mendagri atau Presiden, tidak Kemendikbud. Jadi kita tidak tahu bagaimana penggunaan dana pendidikan, kita memang tahu bagaimana kinerja pendidikan ya dari statistik dari BPS dan sebagainya, tapi tidak ada laporan khusus mengenai hal ini. Setahu saya selama ini, ya *output*-nya ada. Tapi kita tidak menerima laporannya. Yang menerima laporannya Kemendagri ya, dari Pemda-Pemda itu, karena Pemda itu kan di bawah koordinasi Mendagri.

KETUA RAPAT:

Sorry Pak, pendalaman Pak.

Nomenklaturnya sudah dijelaskan *nggak* anggaran ini adalah untuk, kalau gaji kita tahulah bayar gaji-gaji DAU ya?

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Iya.

KETUA RAPAT:

DAK-nya untuk apa, untuk apa, ada *nggak* nomenklaturnya?

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Ada, ada.

KETUA RAPAT:

Ada tertuang?

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Iya tertuang. Iya ada.

KETUA RAPAT:

Karena banyak nih Pak, di daerahnya Pak Rano Karno katanya sekolahnya *nggak* minta, tahu-tahu dapat.

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Iya.

KETUA RAPAT:

Gitu.

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Iya.

F.P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E.,MMTr.):

Kang Dede boleh pendalaman *nggak*?

KETUA RAPAT:

Iya.

F.P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E.,MMTr.):

Mumpang ketemu Pak Ainun. Kata Pak Ainun, yah ke sini ditanyain terus sekarang, *nggak* apa-apa ya Pak ya?

Jadi kan sekarang nih ada satu mekanisme pengajuan dari sekolah-sekolah di daerah, baik negeri maupun swasta terkait dengan kebutuhan pendidikan mereka masuk dalam sistem yang ada di Dinas Pendidikan. Setelah dia masuk di dalam Dapodik, kemudian dia tetap harus mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten maupun provinsi. Tergantung jenjangnya apa yang dibutuhkan.

Misalnya SD Muhammadiyah 4, perlunya apa? SD Al Washliyah perlunya apa? SD-nya Persis perlunya apa? Masuk dalam sistem. Terus kemudian baru dari sistem itulah yang diseleksi, mana yang nanti akan mendapatkan dan alokasi khusus, baik itu fisik maupun non fisik.

Apakah sistem itu berlaku sampai sekarang atau kemudian yang menjadi prioritas adalah sekolah negeri yang masuk dalam sistem itu gitu? Itu yang pengin tahu aja gitu. Supaya nanti buat kita jelas DAK ini dialokasikan oleh siapa, verifikatornya siapa dan akhirnya turunnya bagaimana?

Terima kasih.

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Ya saya kira sistem itu masih ada, namun koordinasi penentuan alokasi DAU, DAK itu ada di Bapenas. Kementerian Keuangan dalam ini akan ada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, jadi itu yang mengolah kemudian mengalokasikan. Tentu bersama kami juga, bersama Kemendikud ada rapat koordinasi membahas itu di, di Bapenas. Kemudian ditetapkan alokasinya.

Jadi itu yang mengenai transfer daerah, tapi kalau pelaporannya ya mereka melaporkan ke Kemendagri.

Saya kira itu Pak dari saya.

KETUA RAPAT:

Kira-Kira berapa berapa persen Pak butuh Kemendikbud dari saat ini hanya 15% logisnya?

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Begini saya kira kalau kita harus mengalokasikan untuk BOPTS, kemudian juga membantu mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu ya, termasuk siswa yang tidak mampu. Itu paling tidak 25% dari total dan masalah di anggaran Kemendikbud itu kan populasi yang dilayani meningkat tapi kenaikan anggaran tidak meningkat.

Secara proporsional bahkan peningkatannya lebih kecil. Di samping itu ada atau banyak yang sudah *committed-committed* itu Mas. Misalnya tidak bisa dialokasi lagi. Misalnya untuk tunjangan profesi guru dan dosen, itu kan *nggak* bisa di-*uthik-uthik*, harus dialokasikan. Jadi yang bisa di apa namanya, di, dialokasi lagi itu tinggal sedikit.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Ainun.

25% angka yang masih masuk di akal sih ya. Berarti kalau dari saat ini, hampir 100 triliun tambah 10% lagi, berarti bisa nambah jadi 160, 170 ya Pak ya. Itu bisa sangat membantu BOPTN, gaji dosen, guru, dan lain-lain ya *noted* Pak.

Baik silakan dari Muhammadiyah, mungkin ada masukan.

MUHAMMADIYAH (ANDY DWI BAYU BAWONO,S.E.,M.Si., Ph.D.):

Baik terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati pimpinan sidang Komisi X,
Bapak dari PBNU dari AI Wasliyah dari Persis yang saya hormati,**

Baik saya pikir ada beberapa hal yang tadi mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya kayak, misalnya berapa sih persentase yang ada di kementerian Dikbud dan Kemenag ya.

Bapak Ibu kalau misalnya kami di Muhammadiyah kebetulan dari 172 Perguruan Tinggi yang kami kelola itu ada kurang lebih sekitar 23 perguruan tinggi di bawah Kemenag, sisanya perguruan tinggi Muhammadiyah yang sifatnya di bawah Kemendikbud, mungkin dulu Prof Ainun ya.

Kemudian memang dari 170 tersebut memang kita menangani kurang lebih sekitar 20.000-an dosen dengan 600-an, 18.000 mahasiswa dan memang dari sekian banyak masa, mayoritas memang kebetulan yang lemah ya, ekonomi lemah ya. Sehingga kemudian mungkin *alhamdulillah* kami dapat bantuan juga dari pemerintah ya dari begitu, dari mungkin bewasiswa

unggulan. Kemudian KIP dan terbesar memang KIP Bapak-Bapak Ibu-Ibu. *Alhamdulillah* terima kasih.

Hanya memang kalau kita melihat kalau melihat kondisi *riil* yang sekarang terjadi, memang kalau saya katakan, kita memang agak protes dengan sekarang PTNBH itu mulai *merangsek* ya. Mengambil juga beberapa ya, istilahnya itu apa pasar kita juga, ya ini yang kita memang menjadi sedikit protes Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.

Karena memang kebetulan kalau kita lihat selama ini kalau kita bandingkan kenapa mereka banyak mengambil, karena ya tadi karena menjadi PTNBH maka mereka tidak efisien kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi swasta seperti kami. Memang kami agak sedikit efisien dari sisi misalnya rasio dosen, mahasiswa yang mungkin cenderung agak mepet begitu ya, tidak terlalu ideal tapi mepet.

Kemudian juga mungkin tendik yang kita *hire* mungkin kalau dilihat rasionya yang menangani sebagai tenaga pendidikan atau tenaga yang *supporting* itu tidak terlalu banyak di setiap perguruan tinggi. Ini yang buat kita itu mungkin secara *riil* efisien sebenarnya jadi kalau Bapak Ibu mungkin tadi melihat detail pembelanjaan atau pengeluaran itu, sebenarnya kalau kita bandingkan swasta itu lebih jauh lebih rumit Bapak-Bapak Ibu-Ibu.

Karena kalau kita seperti di Muhammadiyah, kita ada karena kita tidak hanya catur tridarma ya pengajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kita ada namanya dharma keempat, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyah, di mana itu juga kita menangani *supporting* dana untuk persyarikatan dari mulai ranting sampai binaan pusat, kemudian juga ortom kita menangani juga untuk pengabdian masyarakat.

Pengembangan misalnya kami ke Wakatobi atau *support* ke, mohon maaf ini kami lagi membuka juga di Teluk Bintuni untuk menangani teman-teman kita yang di sana. *Nah* ini beberapa hal ya itu yang kita lakukan termasuk kita haul antar persyarikatan antar Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah itu.

Nah itu yang mungkin menjadikan kemudian kita tetap membutuhkan ya apa namanya itu *support*, tadi sebagaimana tadi rekan mengatakan menggunakan *public private partnership* tadi ya. Bahwa kemudian kita diberilah apa, semacam kayak insentif atau bantuan yang kita kemudian akan kembangkan. Kita akan tambahkan dengan dana kami dengan dana kita, kemudian kita akan alokasikan untuk menunjang pendidikan di masyarakat.

Satu lagi tadi mengutip juga dari Prof Ainun, tambahan adalah masalah pajak. Memang kita tahu pajak itu kita ada keringanan ya bahwa pengalokasian pajak itu selama 4 tahun kalau di sisa lebih itu akan boleh tidak dibayarkan asalkan di investasikan kembali ya ke dalam aset dan sebagainya.

Tetapi memang ada beberapa hal yang kadang-kadang ini *tricky-tricky*-nya. Kadang-kadang dengan teman-teman pajak itu, kadang-kadang mereka juga butuh target, sehingga kemudian ada beberapa poin yang tetap mereka membidik perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta sebagai budget pajak.

Apalagi kalau di area tersebut, mohon maaf tidak memiliki industri atau tidak memiliki sasaran lain. Maka ya yang dikejar ya teman-teman perguruan tinggi swasta ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. *Nah* ini yang kami memohon, kalau bisa ada sedikit keringanan ya, relaksasi untuk kami untuk kemudian tidak kita hitung barenglah. Kita ibaratnya, kita sudah menunjang pendidikan masyarakat. Mari kita duduk bareng untuk menyelesaikan hal ini.

Saya pikir itu beberapa hal, mungkin Prof Irwan mau nambah.

MUHAMMADIYAH (Prof. Dr. H. IRWAN AKIB, M.Pd.):

Terima kasih.

Terkait dengan sekolah kedinasan ya, memang saya kira perjuangannya Prof. Ainun, sudah berkali-kali teman-teman di DPR juga sudah berkali-kali untuk menyatukan itu. Mungkin agak berat, tetapi jalan lain yang kita bisa tempuh dengan mempertegas fungsi anggaran pendidikan di kementerian itu ya. Katakanlah tadi, seperti baju seragam, apa semua dikeluarin aja dari situ. Betul-betul yang yang di sekolah kedinasan. *Nah* jadi anggaran yang masuk di sekolah kedinasan itu yang betul-betul fungsi pendidikannya jelas, kalau seperti seragam apalagi transport macam-macam itu kan bisa dikeluarin. Sehingga anggaran ini bisa kembali ke Kementerian Pendidikan. *Nah* itu satu.

Yang kedua memang sesungguhnya kalau kita bicara tentang anggaran pendidikan di perguruan tinggi swasta, Prof. Zainudin sudah pengalaman betul. Itu karena beliau mengangkat, berangkat dari nol itu perguruan tingginya, berangkat dari nol termasuk menderita jadi Rektor. Itu mulai cari mahasiswa, cari duit, cari macam-macam. Jadi Rektor di PTS itu cari-cari mahasiswa, cari duit membangun sendiri dan seterusnya. *Nah* mengalokasikan anggaran makanya terlalu cepat putih rambutnya Prof. Zainudin itu waktu.

Nah maksud saya dengan pengalaman itu teman-teman yang jadi PTNBH kalau tidak pengalaman seperti itu berat memang, berat memang, sehingga ya perlu memang ada upaya untuk apa namanya. Termasuk kepala sekolah kami di, di, di Muhammadiyah, kepala sekolah harus kreatif mencari sendiri duit, kalau tidak bisa mati gurunya. Itu *nah, nah* inilah kemudian pentingnya subsidi ke ke perguruan tinggi swasta atau sekolah-sekolah swasta itu tadi, termasuk teman-teman yang bukan hanya dari ormas Islam. Hampir semua pengelola lembaga pendidikan swasta merasakan itu.

Apalagi kalau guru-guru apa namanya, guru-gurunya tadi yang masalahnya gini yang masuk ke P3K itu guru-guru yang sudah matang yang sudah pengalaman macam-macam. Kita sudah didik, sudah, sudah *training*

macam-macam, lalu kemudian tiba-tiba terangkat P3K ditempatkan di, di negeri. Padahal itu sesungguhnya bisa mengurangi beban kita kalau mereka tidak diambil oleh ditempatkan di sekolah negeri. *Nah* saya kira itu tambahan dari saya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MUHAMMADIYAH (R. ALPHA AMIRRACHMAN,M.Phil., Ph.D.):

Mohon izin Pak Pimpinan.

Sedikit menambahkan untuk yang Dikdasmen, yang pendidikan agama.

KETUA RAPAT:

Saya perpanjang sedikit Pak, tadi waktunya kelewat, saya perpanjang 15 menit lagi ya.

MUHAMMADIYAH (R. ALPHA AMIRRACHMAN,M.Phil., Ph.D.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

MUHAMMADIYAH (R. ALPHA AMIRRACHMAN,M.Phil., Ph.D.):

Terima kasih Pak Pimpinan dan.

KETUA RAPAT:

Soalnya lagi seru nih Pak.

MUHAMMADIYAH (R. ALPHA AMIRRACHMAN,M.Phil., Ph.D.):

Iya dari Ibu Ledia tadi dipertanyakan tentang Kemenag dan Kemendikbud, mana yang masuk ke Kemenag, mana masuk di Kemendikbud.

Untuk pendidikan dasar dan menengah kami dari 5.346 itu 180 ada di Ibtidaiyah 400 di ada di tsanawiyah 130 ada Aliyah. Jadi totalnya 1.610 ditambah dengan pesantren 440 ditambah dengan taman pendidikan Al-qur'an seluruhnya totalnya 3.810 dari 5.346 dan ini mohon maaf selama ini juga *openan* dari Kementerian Agama juga sangat kurang seperti itu. Jadi mohon mungkin bisa perhatian dari Bapak Ibu.

Yang kedua Bapak Pimpinan Sidang yang saya hormati,

Terkait dengan P3K, mungkin kita perlu melihat Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang memberikan amanah untuk memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah swasta itu dapat dilihat sebagai *lex generalis*, sementara Undang-Undang ASN itu dilihat sebagai *lex specialis*.

Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita tidak melihat tumpang tindih di antara keduanya dan jelas di situ disebutkan bahwa ada diberikan tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan itu saya kira tidak selalu harus disamakan dengan tugas di pemerintahan. Ini tugas pemerintahan itu adalah tugas negara yang ditempatkan di sekolah-sekolah berbasis masyarakat. Saya kira itu sangat sangat mungkin sekali, kalau kita membuat terobosan hukum ke arah sana. Saya kira itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan Sidang yang saya hormati.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak.

Kawan-kawan dari Persis. Silakan ada jawaban.

PERSIS (Prof. ATIF LATIFULHAYAT, Ph.D) :

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya mencermati ini *kan* kita sebetulnya berbicara politik anggaran pendidikan itu yang menjadi *core* dari politik anggaran pendidikan dan setelah kami cermati, paling tidak menyangkut tiga hal dari kerumitan yang tadi disampaikan.

Pertama kelembagaan, kelembagaan ini dua hal, kelembagaan politik tadi tidak ketemu. Kemendikbud ternyata tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi, termasuk juga anggaran tadi. Kata Pimpinan *given* di situ. Itu kan rasionalitas nalar hukumnya menurut saya tidak, tidak nyampai. Harusnya kan kementerian yang mengatur pendidikan dia sendiri yang menentukan anggaran.

Jadi sebetulnya kan pemilik negara ini ya Kementerian Keuangan. Kalau dari segi itu, sehingga ini contoh kecil saya pernah menjadi *reviewer* LPDP. Saya kok bisa ya kalau di sini honor itu cepat dan sesuatu yang bukan honor itu kok di LPDP bisa? Iya karena yang ngaturinya Kementerian Keuangan, jadi bisa dibayangkan itu jadi *the core problem*-nya ada di Kementerian Keuangan.

Di situ kelembagaan bagaimana relasinya termasuk Komisi X mengeluh, *kami kan* tidak bisa ke Komisi VIII. Komisi VIII *gelagapan*, jadi ini kan masalah kelembagaan dan ini adalah persoalan politik yang harus diselesaikan.

Yang kedua politik anggarannya tergantung juga kewenangan yang dimiliki masing-masing. *Nah* baru nanti ke alokasi anggaran jadi kalau belum bisa diselesaikan yang 20 anggaran, yang 20% itu. Tadi misalnya Pimpinan bertanya kepada Pak Ainun, berapa 25%. Kalau menurut kami kurang, tadi kami mengusulkan bahkan idealnya itu ya 50% lah idealnya.

Jadi di sini perhitungannya bukan lagi perhitungan detail-detail dari paradigma keuangan, akan tetapi harus berangkat dari paradigma pendidikan kita. Umpamanya Pasal 31 Undang-Undang Dasar, kita akan membangun satu sistem pendidikan. Apakah di *situ* maknanya bahwa semua penyelenggara pendidikan itu oleh Kemendikbud? Jadi Kementerian Agama disatukan di situ gitu, apa kita memaknai itu? Selesaikan dulu per kelembagaan dan itu bukan kapasitas ormas untuk menyelesaikan itu kelembagaan.

Kemudian apa sih paradigma pendidikan, apa dikotomi di sini, mungkin bukan dikotomi ya, pemisahan itu pembagian tugas PTN PTS. Sekarang itu menjadi sangat apa namanya *sattle* sekali itu. Perbedaannya PTS itu nyaris seperti PTN sebetulnya, kan dapat juga Serdos, tunjangan kehormatan guru besar juga sama, dari situ, penelitian juga dapat.

Kalau dulu saya daftar ke PTN, karena murah. Kalau sekarang ke PTN mahal, yang murah swasta. Karena di situ ada *at the expense of* para dosennya. Ya termasuk kaya BPJS. Anak saya dokter, ini Pak BPJS dibayar murah, kenapa kemudian negara harus mengambil dari, dari apa nama dari profesi yang sulit. Begitu juga dengan pendidikan, jadi dosen kemudian sudah berkorban dia apa, kenapa di swasta apa murah pengorbanan di situ.

Nah tolong dijelaskan dulu gitu apa PTN dan PTS, *nggak* mampu juga menurut saya pemerintah untuk membiayai di kita kan ada 4.000-an kurang lebih perguruan tinggi. Dibandingkan dengan Cina kita jauh lebih besar kalau kita membandingkan laporan dari OECD tentang pengelolaan pendidikan tinggi, itu Indonesia tidak masuk. Ada empat komponen khusus pendidikan tinggi dari *household, other private, international* dan *government*. Semua negara OECD yang paling besar itu adalah kontribusi dari *government* untuk pendidikan tinggi. *Nah* makanya kita akan bisa gitu untuk pendidikan tinggi ini pemerintah itu mau berapa persentasenya, untuk yang menengah berapa.

Nah yang tertinggi di sini adalah Finland apa Austria, 93,8% dia, kemudian Finlandia 93,1. *Nah* jadi menurut kami politik anggaran pendidikan tolong diselesaikan dulu masalah kelembagaannya, kewenangannya, baru kemudian alokasi anggarannya dan *plus* itu tadi. Harus dijelaskan PTN itu apa tujuannya dulu kan disubsidi oleh pemerintah.

Saya kuliah di Unpad, Pak Dede alumnus UNPAD juga kan? 27.000, kemudian saya kuliah lagi bareng di IAIN, uang kuliahnya 17.000 murah sekali dulu di situ. Sekarang makanya kenapa KIP *nggak* mau negeri itu karena harus mensubsidi, bahkan universitas swasta besar juga *nggak* mau dengan KIP hanya 2.500.000 ya? Sementara ada PTS yang sudah 6, 8 juta karena harus

mensubsidi.

Nah jadi tolong di sini dijelaskan dulu PTN itu apa misi orientasinya kalau memang mau 100% murah maka 100% dan alokasi apa yang ke PTS kalau mau sarana, sarana saja SDM-nya tidak. Sekarang kan dosen dari PTS juga dapat serdosnya penelitian juga di situ. Kelembagaan juga jangan apa ya *overlap*, LPDP juga ada untuk penelitian di LPDP, jadi *nggak* jelas juga akhirnya penelitian di LPDP BRIN dan lain sebagainya.

Saya kira itu apa dari kami untuk catatan akhirnya, Saudara Pimpinan.

Terima kasih.

Aasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof Atif.

Sebetulnya keluhan-keluhan tadi ya keluhan kita juga di sini, karena memang kalau sudah bicara kelembagaan, kita ini saling *pacorok kokot* Pak, tumpang tindih, tumpang tindih, tapi.

Mangga dari Al Wasliyah.

AL WASHLIYAH (Prof. Dr. H. DEDING ISHAK, MA):

Baik sebelum nanti teman menyampaikan usulan teknis, saya ingin menanggapi, merespon apa yang disampaikan oleh senior nih, Prof. Atif beliau ini ahli hukum, jadi sudah *sahid*.

Jadi pembicaraan terkait dengan kewajiban atau perintah konstitusi ini tidak bisa dibantah lagi. Jadi tidak bisa di-*kutak-atik* lagi secara teknis, melalui Peraturan Perundang-Undangan sudah tidak bisa 20% ini sudah jelas minimal jadi minimal 20%. Jadi tergantung *political will* sebetulnya sudah ada, cuma setengah-setengah *nih* pemerintah ini, DPR sudah berjuang sangat maksimal, saya tahu. Kebetulan senior saya Pak Kahar ini kan di sini tadi disampaikan oleh teman Komisi X, jadi menurut saya ini momentumnya Pak Dede.

Ini jadi saya sangat mengapresiasi dan bangga momentum Komisi X bikin Panja yang belum pernah sebelumnya kan begitu, khusus Panja Pembiayaan Pendidikan? Karena memang soalnya di situ, jadi 20% ini tidak jelas gitu, distribusi alokasinya, termasuk bagaimana menempatkan kementerian menjadi *core* gitu. Jadi kalau ini harus naik ke, kalau menurut saya. Saya usul pertama, forum ini ditingkatkan, ini yang bicara itu nanti Pimpinan Komisi X dan anggota langsung Pimpinan DPR dengan Presiden, mumpung, ini, ini harus.

Termasuk dari aspek implikasi kelembagaannya kalau saya melihat karena sudah *existing*, sekarang ini ada dua sebetulnya kementerian yang

harus dibicarakan secara khusus ya. Jangan sampai ini dikotomis, tapi harus sinergi harmonis. Yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi dan Kementerian Agama. Kalau memang tidak ada perubahan nomenkatur, nanti ada Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek dan sebagainya, itu urusan nanti ya, tapi itu dulu sekarang, dibicarakan. Jadi kalau Pak Pak Atif tadi bicara minimal 50%, saya dukung itu. Saya dukung, kami dukung, harus 50%.

Nah dari 50% ini, alokasikan dulu kebutuhan di lingkungan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Tentu pasti porsi nya berbeda Pak, tapi harus adil, karena tetap ini akan senjang terus juga sama.

Nah yang pusing kan Komisi X begitu di sini *nggak* bisa, Kementerian Agama juga *nggak* mau disatukan *kan* begitu. Karena kalau menurut saya ini Kementerian Agama dengan Ibu Ledia itu bicara waktu itu, kalau seperti ini tidak mungkin ini akan tetap juga kita kurang gitu. *Nah* kan prihatin bagi semuanya, oleh karenanya menurut saya pertama memang harus dibicarakan pada forum yang lebih momentumnya, *insyaallah* bisa.

Kedua, yang tadi, jadi kalau sebetulnya kan fungsi pendidikan ini 20% fungsi pendidikan. *Nah* sekarang di, di, di-*engginer* begitu, seolah-olah kementerian juga menyelenggarakan, makanya juga rumit juga.

Nah tapi kalau *strict* di situ 50%, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikbud dan Kementerian Agama, baru kita bicara yang lainnya, dinas kalau memang, tapi sebetulnya itu bagus nya di satu atapkan. Masuk ke sana, ke Kemendikbud, kalau saya begitu.

Yang kedua ini terkait dengan tadi ada soal di Kementerian Agama dan Kementerian Dikbud ini, kami Al Washliyah menyampaikan saran begitu. Masukkan Komisi X dan Komisi VIII untuk mencari solusi efektif juga dalam penyelesaian permasalahan minimnya alokasi anggaran di KIP Kemenag ini. Barangkali nanti bisa dibicarakan lagi KIP di Kemenag ini sangat sedikit begitu.

Sehingga kalau di kami ini, kalau di Al Washliyah ini kan tanya, kok STAI ini dapat 30, kok ini dapat 100. Ya memang rejeki kan *kuma*, *kuma* amalan-amalannya gitu Pak Dede. Tapi kan, tapi kan sedih juga mahasiswanya yang di sana gitu. Ini *mah* barangkali tambah amal Komisi X ini Pimpinan dan Anggota, *insyaallah* menjadi ahli surga Pak. Benar kalau saya itu jamin Pak, saya bisa memastikan. Ini fatwa dari Al Wasliyah. Karena sedekah amal ini bukan bangun masjid saja, jadi pendidikan *jihad* Pak, *jihad*. Kalau kita bisa itu *kan* surat *Iqra* itu ya, jadi itu, jadi maksud saya itu.

Jadi mohon barangkali bagaimana ada rapat gabungan dan sebagainya. Dulu waktu saya pernah itu, ada dari Dirjen Dikti terkait dengan soal dosen, *alhamdulillah* bagus Pak. Jadi peran Komisi X, Komisi VIII ini diapresiasi masyarakat, karena juga kita ada bantuan tenaga dosen dari Kemendikbud.

Kemudian tekanan terakhir, mahasiswa kami ini mahasiswa *dhuafa*' apa jadi menengah ke bawah, jadi sama-sama. Oleh karenanya perlu memang mendapat perhatian dan keberpihakan.

Yang terakhir soal DAK. Coba guru ini bukan DAK, DPK, dosen DPK.

AL WASLIYAH :

Oh DPK.

AL WASHLIYAH (Prof. Dr. H. DEDING ISHAK, MA):

Ya silakan.

AL WASLIYAH :

Baik terima kasih Prof.

Ada dua hal yang ingin di sampaikan dalam konteks penguatan tata kelola khususnya di pendidikan tinggi. Memang untuk pendidikan tinggi khususnya di PTS, selain tadi tidak ada BOPTS dan lain-lain. Memang untuk layanan yang sifatnya peningkatan mutu dan tata kelola, ini memang standarnya sama, tetapi keberpihakannya kurang termasuk juga untuk SDM tadi di-*slide*-nya Prof Ainun juga ada.

Bantuan dosen di kami juga, sebetulnya dosen ini kan untuk kunci untuk tingkatan *output* lulusan. Jadi memang untuk DPK dosen perbantuan dan sebagainya yang sudah lama tidak ada moratorium dan sebagainya, ini juga menjadi salah satu *wayout* begitu. Solusi untuk bisa meningkatkan kualitas yang lebih baik. Tadi ada *sister university* PTN dan PTS ataupun PTS PTS *inbound* dan *outbound* ini juga menjadi penting, karena yang namanya sampai kepada VIP *visiting profesor* misalnya ataupun *visiting lecture*, itu lebih berpihak banyaknya di PTS. Sedangkan PTS sedikit ya Prof dan ini menjadi satu layanan yang memang menjadi terobosan ketika kita bicara masal QC untuk mutu lulusan.

Nah untuk didasmen memang dana BOS itu mesti ditingkatkan Kang Dede, *quantity* dan komponen di dalamnya. Apalagi nanti ditambah dengan ada *social service* untuk makanan dan sebagainya itu sangat kecil untuk kegiatan tambahan saja. Untuk BOS talenta misalnya atau untuk peningkatan yang lain aktivitas itu *nggak* cukup sangat *nggak* cukup, untuk operasional sekolah memang cukup untuk satuan tapi untuk aktivitas itu sangat sedikit dan itu sangat terbatas.

Sama halnya seperti KIPK kita membatasi komponen semua mahasiswa tidak bisa dipungut tambahan sama sekali tetapi untuk mengikuti aktivitas tambahan untuk peningkatan mutu itu juga jauh. Jadi memang selain layanan ada juga keberpihakan dalam konteks peningkatan jumlah nilai untuk

Dikdasmen dan untuk pendidikan tinggi layanan, baik yang sifatnya *man power human resource* begitu, sampai kepada sarana yang mesti ada pendampingan dan standar yang sama. Karena ini kalau *nggak* dia akan yang satu cepat larinya yang satu akan *smooth* begitu, *smooth down* ke bawah dan ini menjadi *gap* yang *nggak* baik.

Yang terakhir terkait dengan kalau ditanya *unit cost*, memang untuk pendidikan tinggi *nggak* murah ya, cukup cukup tinggi. Untuk aktivitas Tridarma yang dilakukan oleh dosen dan tendik, itu saja tidak membebani pembiayaan mahasiswa sebetulnya, karena memang dengan PPP dan dengan hibah dan sebagainya. Kalau itu membebani maka untuk klaster pembiayaan cukup cukup tinggi, tadi kalau di ditanya 2,48 mungkin ada di UKT 4 atau 5. Memang *range*-nya akan ada di, di sana ketimbang minimalis, tetapi dengan kualitas yang juga minimalis mungkin itu tambahannya.

KETUA RAPAT:

Baik cukup ya kawan-kawan, ini sudah banyak sekali masukannya terutama yang 50%. Tadi bagus sekali Pak, kita maunya begitu Pak, tapi kita harus berhadapan dengan beberapa komisi lain ya dan waktunya takut *nggak* ngejar juga, karena kita September sudah harus selesai. Semua panja-panja Oktober sudah pelantikan yang baru. Minimal apa yang kita lakukan ini bisa mendorong pemerintahan baru nanti ketika membuat kebijakan keuangan terhadap anggaran pendidikan. Jadi sebetulnya kita tuh pengen bikin *legacy* Pak. *Nggak* mungkin kita putus saat ini juga, tapi kalau tidak dibantu ormas-ormas besar seperti Bapak-Bapak sekalian, mana mungkin kita bisa didengar gitu.

Jadi terima kasih sekali, saya akan membacakan apa namanya kesimpulan yang sifatnya sebetulnya mengapresiasi Pak. Karena Panja kita tidak bikin kesimpulan saat ini, tapi terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain :

1. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian secara khusus dengan mengundang para pakar K/L terkait dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menghitung rasionalitas distribusi anggaran fungsi pendidikan kewenangan K/L yang mengelola dan rincian komponen wajib pembiayaan pendidikan pada setiap jenjangnya.

Jadi artinya Kementerian Keuangan, Bapenas, Kementerian Agama, K/L K/L lain, kita akan panggil juga ya. Walaupun pasti nanti harus minta izin ke Komisi VIII misalnya ya belum tentu dikasih juga Pak. Apalagi kalau kita manggil Kementerian Keuangan ke Komisi XI, belum tentu dikasih juga, tapi kita harus berjuang ya Pak ya.

2. Mendukung pandangan PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB AI Wasliyah untuk mencermati kembali kebijakan alokasi anggaran fungsi pendidikan yang didistribusikan dalam belanja

- pemerintah pusat agar anggaran 20% bidang pendidikan dalam dimanfaatkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perluasan akses dan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
3. Mendorong PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB AI Wasliyah untuk memberikan kajian yang lebih komprehensif tentang alokasi anggaran fungsi pendidikan dan distribusinya di setiap K/L yang diarahkan untuk jaminan ketersediaan akses dan mutu pendidikan untuk masyarakat.
 4. Mendorong PBNU, PP Muhammadiyah, PP Persis, dan PB AI Wasliyah untuk menyampaikan data mengenai penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masing-masing lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kemenag RI dan Kemendikbudristek RI beserta pembiayaannya sehingga diperoleh gambaran mengenai postur anggaran pendidikan pada Kemenag RI dan Kemendikbudristek RI.
 5. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek RI perlu menetapkan standar pengelolaan anggaran pendidikan yang proporsional dan adil dengan melibatkan Kementerian yang mengelola dana fungsi pendidikan dan sekolah kedinasan.
 6. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI akan mengundang Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dalam waktu dekat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan berimbang.
 7. Wacana mengenai alokasi dan berbagai anggaran fungsi pendidikan yang melanggar undang-undang akan menjadi kajian khusus Panja dengan mengundang pakar hukum.

Ya tadi disampaikan Prof Adib, apa tadi, soal apa tadi ya? Kelembagaan, terus kemudian dari Muhammadiyah juga menjelaskan tadi mana yang lebih tinggi derajatnya kan Kira-kira tapi kita harus panggil pakar hukum Pak. Kebetulan kita di sini kebanyakan bukan pakar hukum itu tapi pakar kebijakan nanti kita akan coba *review* terkait hal itu.

Kemudian ya bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada pemerintah.

Kawan-kawan kurang lebih seperti itu ya, ini adalah *review*, kami tidak memberikan kesimpulan Panja, tapi ini adalah rentetan beberapa waktu berikutnya. Kita akan mengundang juga dari agama ormas agama lain juga ya mungkin, termasuk juga perguruan tinggi berbasis perusahaan-perusahaan besar Pak. Kita juga pengen tahu, kenapa banyak perusahaan besar sekarang bikin sekolah gitu kan ya itu ininya lah? Supaya akhirnya nanti bisa tahu Pak kira-kira kenapa ada, terjadi, apa namanya pengelolaan yang berbeda gitu?

Apa jangan-jangan perusahaan besar itu sudah punya tambang NU, Muhammadiyah belum punya tambang gitu kan? Mungkin nanti setelah punya tambang agak beda Pak.

Teman-teman bagaimana?

F.PAN (Prof. ZAINUDDIN MALIKI,M.Si.) :

Tadi yang poin 7, Poin 7 tolong di ini.

KETUA RAPAT:

Poin 7, wacana mengenai alokasi.

F.PAN (Prof. ZAINUDDIN MALIKI,M.Si.) :

Undang-undang tentang undang-undang tadi.

KETUA RAPAT:

Coba ditampilkan.

F.PAN (Prof. ZAINUDDIN MALIKI,M.Si.) :

Iya, wacana mengenai alokasi dan sebagai dan sebagai mengenai lokasi dan sebagai anggaran, kok bahasanya kurang ini ya?

KETUA RAPAT:

Oh.

F.PAN (Prof. ZAINUDDIN MALIKI,M.Si.) :

Wacana mengenai alokasi, alokasi dan sebaran anggaran fungsi pendidikan yang melanggar undang-undang akan menjadi kajian khusus Panja dengan mengundang pakar hukum yang seolah-olah tidak apa namanya, tidak sinkron.

Itu bukan hanya soal alokasi dan sebaran anggaran tapi juga mengenai pengangkatan P3K yang antara undang-undang ASN dengan tadi Mas Alfa.

F.PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL,S.E.) :

Itu, itu Prof. harus revisi Undang-Undang Pendidikan, karena penempatan itu di-undang itu memang sudah, kalau *nggak* salah saya. Mungkin bisa tenaga ahli bisa jelaskan bahwasannya penempatan ke swasta saat ini tidak dilindungi dengan undang-undang yang ada gitu?

KETUA RAPAT:

Itu maksudnya yang tadi dibilang *lex specialis* dan *lex generalis* kita paham maksudnya Pak.

Artinya kalau apakah pendidikan ini dianggap *generalis* atau *spesialis* yang Undang-Undang ASN tadi kan itu tentu kita, kita akan *review* juga. Kalau alokasi ini yang kita pengen tahu tuh begini, apakah undang-undang mandatori 20% itu urutannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Keuangan Negara?

Nah itu, itu juga penting, betul *nggak* Prof. Ainun? Mustinya kalau mandatori Undang-Undang Dasar harusnya lebih tinggi gitu. *Nah* ini kita juga pengen, pengen cari tahu kenapa yang menetapkan akhirnya Kementerian Keuangan gitu. Karena hampir semua undang-undang Pak, kalau Menteri Keuangan bilang tidak, tidak, selesai.

AUDIENS:

Punya uang kali Pak ya.

KETUA RAPAT:

Itu yang tadi dibidang kelembagaan tadi kan? *Nah* makanya mumpung nanti presidennya baru, kita harus *insight* gitu loh.

AUDIENS:

Karena Anggota DPR-nya baru juga gitu.

KETUA RAPAT:

Ini yang jadi semua Pak.

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Ya, jadi dalam undang-undang.

KETUA RAPAT:

Prof. Ainun.

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Keuangan negara dan perbendaraan negara yang memegang kuasa keuangan negara itu bukan presiden Pak, tapi Menteri Keuangan.

F.PDIP (RANO KARNA, S.IP):

Oh ya sudah selesai, itu sudah selesai Pak.

KETUA RAPAT:

Nggak bisa *ngelanjutin* Panja kalau begitu Pak.

F.PDIP (RANO KARNA, S.IP):

Besok saya jadi Menteri Keuangan aja Pak.

KETUA RAPAT:

Di undang-undang apa itu Pak?

F.PDIP (RANO KARNA, S.IP):

Pak, di undang-undang apa Pak?

KETUA RAPAT:

Undang-undang.

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Pembendaharaan Negara.

AL WASHLIYAH (Prof. Dr. H. DEDING ISHAK, MA):

Dari Pimpinan, mohon izin, barangkali.

KETUA RAPAT:

Jadi Presiden tidak punya kekuasaan Pak?

AL WASHLIYAH (Prof. Dr. H. DEDING ISHAK, MA):

Maksud saya begini, justru kalau menurut saya ini temuan yang, temuan. Maksud saya ini perlunya ditegaskan Pak di sini, justru ini potensial justru melanggar Undang-Undang Dasar, potensial melanggar Undang-Undang Dasar yang di-*bypass* begitu.

Nah kita mungkin maaf ya teman-teman DPR, termasuk saya juga mungkin waktu itu *teledor* soal keuangan negara, itu kan. *Nah* tapi memang kelemahan kita sekarang di Republik ini ada soal selain soal undang-undang yang seperti itu, kualitasnya juga tidak sinkron, tumpang tindih, lain sebagainya, tidak *match* begitu.

Nah oleh karena perlu ditegaskan sini, jadi *nggak usah*, ini *nggak* usah berhenti Pak.

KETUA RAPAT:

Iya nanti kita akan me-*review* Pak panjang lagi.

Siapa siapa Pak Deding harus jadi DPR lagi itu. Pak masih fraksi yang sama atau ada rencana pindah Pak?

Baik, apakah dirasa cukup ini, cukup ya Bapak-Bapak ormas?

F.PDIP (RANO KARNA, S.IP):

Cukup tapi satu saat diundang lagi ya Pak. Cukup hari ini, tapi satu saat harus diundang lagi.

KETUA RAPAT:

Baik Pak.

Baik terima kasih banyak, dengan demikian kesimpulan kita hari ini sudah kita dapatkan saya ketok dulu ya.

(RAPAT : SETUJU)

Dan kami atas nama Panja Pembiayaan Pendidikan sangat berterima kasih Pak. Kenapa yang kami undang ormasnya adalah Bapak-Bapak sekalian? Karena sebetulnya yang punya pendidikan ini adalah Bapak-Bapak ini. Ya Kementerian Pendidikan dari dulu kan, ya Bapak-Bapak inilah yang berada di sana.

Nah sekarang kan tentu kita harus meminta *insight-insight* apa, apakah konsep pendidikan kita masih akan sama atau kita sudah mulai tidak lagi berbicara Dikdasmen?

Kita berbicara sumber daya manusia 4.0, bonus demografi, kita harus berbicara pada level yang lebih tinggi lagi. Jadi kita mau arahnya ke sana Pak, jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin sebagai kata penutup bisa diwakili Pak Ainun.

Pak Ainun silakan Pak.

NAHDLATUL ULAMA (AINUN NA'IM):

Baik Pak.

**Bapak Ketua Anggota Panja,
Dan Bapak Ibu dari Muhammadiyah Al Wasliyah dan Persis,**

Terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat ini, *insyaallah* akan bisa memberikan manfaat juga bagi peningkatan layanan pendidikan kita, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Itu kira-kira tadi masih sambutannya bernuansakan pemerintah Pak ya, normatif Namanya.

Terima kasih Pak Ainun. Terima kasih Bapak-Bapak dari PBNU, Muhammadiyah, Persis dan Al Wasliyah.

Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam rapat-rapat berikutnya. Kita tutup dengan membaca *alhamdulillahirabbilalamin*.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

AL WASLIYAH:

Ini syukuran Pak. Ini jadi kalau berkenan kami bersedia untuk mengutus satu orang masing-masing, kalau saya ya, kalau kami dari Al Wasliyah untuk membantu kalau informasi lanjut berikutnya, begitu.

KETUA RAPAT:

Siap Pak, siap.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 15.00 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

**DADANG PRAYITNA, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003**